



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari enam komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

LAKIN ini diharapkan memenuhi mekanisme akuntabilitas Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam menyampaikan capaian kinerja serta menjadi perwujudan kewajiban Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2023. LAKIN disusun merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 yang diimplementasikan dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LAKIN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 ini.

Bandung, 05 Januari 2024
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas dan perwujudan tata kelola yang baik, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PUPR mempertanggungjawabkan pelaksanaan-pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun laporan kinerja untuk melaporkan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada PK 2023, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung sasaran program:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Rating Keselamatan Jalan Nasional melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dengan rincian output berupa Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR melalui IKK Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan dengan rincian output berupa kegiatan Layanan Perkantoran, kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dan kegiatan Layanan Sarana Internal.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Anggaran
Kinerja dan tingkat penyerapan keuangan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2023 dilihat berdasarkan e-monitoring PUPR, PAGU Balai

Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 11.755.966.000, dengan realisasi sebesar Rp 11.443.520.000 atau menyerap anggaran sebesar 97,34%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2023 sudah mencapai nilai 99,21%. Kontribusi terbesar dalam realisasi penyerapan ini adalah kegiatan Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan yang realisasi keuangannya Rp 7.155.006.000 sebesar 96,91%, sementara kontribusi terendah adalah kegiatan Layanan sarana internal dengan realisasi keuangannya Rp 487.132.000 sebesar 99,00 %.

2. Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output diperoleh dengan cara mengukur dan membandingkan rencana/target output yang ingin dihasilkan berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 dengan realisasi output yang mampu dihasilkan dan diwujudkan pada akhir tahun 2023. Dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang telah diperjanjikan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat memenuhi semua KRO.

Tabel Capaian Kerja Output BPLJ TA 2023

No	OUTPUT	SAT	2023		
			Target	Realisasi	Kinerja
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	100
4	Layanan Perkantora	Layanan	1	1	100
5	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100

- Untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, pada Tahun 2023 untuk tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknis, BPLJ telah menerima 249 layanan teknis yang terdiri atas 171 kegiatan advis teknis, 78 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal, serta pendampingan teknis berupa rapat maupun sebagai narasumber. Sedangkan untuk teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan telah menghasilkan 3 kajian teknis, 2 aplikasi, 1 *basic design*, 23 pedoman terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Perkantoran, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 layanan karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan kelancaran pembayaran belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran.

- Untuk kegiatan Layanan Umum, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 layanan karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional pimpinan dan kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran sesuai dengan anggaran selama periode waktu 1 (satu) tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Sarana Internal, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 unit karena telah terpenuhinya pengadaan untuk fasilitas perkantoran dan laboratorium untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, pada Tahun 2023 telah tercapai 1 layanan yang mencakup Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan), Pembangunan Zona Integritas, Administrasi PNBP, dan Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

3. Kendala dan Permasalahan

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2023 yang berdampak pada capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, diantaranya terkait perencanaan awal RKA dan PK yang belum cukup matang, perubahan lokasi pembangunan jalan *test track*, kegiatan-kegiatan yang bersifat direktif dari atasan, disposisi pimpinan, dan undangan pembahasan daring terutama terkait layanan teknis yang mengakibatkan beban pekerjaan berlebih, pendistribusian pekerjaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih belum merata, dan kesulitan dalam pengadaan alat baru akibat kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Secara umum target dan sasaran yang telah diperjanjikan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2023 secara pencapaian kuantitas output dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan secara kualitas output dan anggaran diperlukan rekomendasi strategi dan tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tugas dan Fungsi.....	8
1.3 Struktur Organisasi.....	9
1.4 Isu Strategis	10
1.4.1 Keselamatan Dan Geometrik Jalan.....	11
1.4.2 Over Dimension Over Loading (ODOL)	11
1.4.3 Kemantapan Jalan Nasional	11
1.4.4 Harmonisasi Antar Standar Acuan	11
1.4.5 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pra sampai Pasca Konstruksi 12	12
1.4.6 Kinerja Perkerasan Jalan	12
1.4.7 Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN)	12
1.5 Sistematika Laporan.....	12
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ	14
2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ	16
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ	19
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023	20
2.3 Target Kinerja Tahun Berjalan BPLJ	23

2.4	Metode Pengukuran	25
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI		29
3.1	Sumber Daya Manusia	29
3.1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29
3.1.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	31
3.1.3	PPPK	33
3.1.4	Konsultan Individu	35
3.2	Sarana Prasarana	36
3.3	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	37
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA		40
4.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas	40
4.2	Capaian Kinerja Organisasi	43
4.3	Perbandingan Kinerja Organisasi	71
4.4	Realisasi Anggaran	74
4.5	Pemanfaatan Laporan Kinerja	78
4.6	Paket Diresmikan dan Penghargaan	85
4.7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Layanan Publik	86
BAB 5 PENUTUP		88
5.1	Simpulan Umum	88
5.2	Faktor Pendukung Keberhasilan	88
5.3	Permasalahan	89
5.4	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	89
LAMPIRAN		IX

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024).....	17
Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024).....	17
Tabel 2.3 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Outcome).....	20
Tabel 2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (<i>Output</i>)	21
Tabel 2.5 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023	23
Tabel 2.6 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023	23
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024)	24
Tabel 2.8 Pengukuran Indikator Kinerja 2023 BPLJ.....	27
Tabel 3.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	37
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2023.....	38
Tabel 3.3 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2023	39
Tabel 4.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ.....	41
Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2023.....	44
Tabel 4.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	44
Tabel 4.4 Capaian Kinerja IKU BPLJ 2023	45
Tabel 4.5 Output Teknologi Bidang Jalan yang Dikembangkan	50
Tabel 4.6 Perbandingan Capaian <i>Outcome</i> Kinerja Beberapa Tahun Terakhir	72
Tabel 4.7 Perbandingan Capaian <i>Output</i> Kinerja Beberapa Tahun Terakhir.....	72
Tabel 4.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra	73
Tabel 4.9 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2023	75
Tabel 4.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Satker BPLJ	77

Tabel 4.11 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja
Unit Pelayanan 86

Tabel 4.12 Indeks Kepuasan Masyarakat BPLJ 2023..... 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.....	10
Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ	18
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2023.....	22
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2023.....	22
Gambar 3.1 SDM PNS Berdasarkan Gender	30
Gambar 3.2 SDM PNS Berdasarkan Golongan.....	30
Gambar 3.3 SDM PNS Berdasarkan Usia	30
Gambar 3.4 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan.....	31
Gambar 3.5 SDM PNS Berdasarkan Jabatan.....	31
Gambar 3.6 SDM Non PNS Berdasarkan Gender	32
Gambar 3.7 SDM Non PNS Berdasarkan Usia.....	32
Gambar 3.8 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan	33
Gambar 3.9 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan	33
Gambar 3.10 SDM PPPK Berdasarkan Gender	34
Gambar 3.11 SDM PPPK Berdasarkan Usia	34
Gambar 3.12 SDM PPPK Berdasarkan Pendidikan.....	35
Gambar 3.13 SDM PPPK Berdasarkan Jabatan.....	35
Gambar 3.14 SDM KI Berdasarkan Gender	36
Gambar 3.15 SDM KI Berdasarkan Usia	36
Gambar 4.1 Dokumentasi diskusi pra penajaman anggaran, Rapat Monev bulanan, Reviu Renstra BPLJ, Pembahasan Laporan Kinerja TA 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2023, Penyusunan PK 2024, dan Penyusunan LAKIN BPLJ 2023.....	42
Gambar 4.2 Dokumentasi Layanan Teknis.....	47
Gambar 4.3 Pembayaran Belanja Uang Lembur Tahun 2023	61

Gambar 4.4 Belanja Sehari-hari Perkantoran Tahun 2023	61
Gambar 4.5 Pemeliharaan Gedung Balai dan Laboratorium Tahun 2023.....	62
Gambar 4.6 Pengadaan Pendukung Perkantoran Tahun 2023	64
Gambar 4.7 Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan	66
Gambar 4.8 Kegiatan Kepegawaian Tahun 2023	71
Gambar 4.9 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2023.....	76
Gambar 4.10 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2023	76
Gambar 4.11 Hasil Kuesioner Kriteria 1.....	79
Gambar 4.12 Hasil Kuesioner Kriteria 2.....	80
Gambar 4.13 Hasil Kuesioner Kriteria 3.....	81
Gambar 4.14 Hasil Kuesioner Kriteria 4.....	82
Gambar 4.15 Hasil Kuesioner Kriteria 5.....	83
Gambar 4.16 Hasil Kuesioner Kriteria 6.....	84
Gambar 4.17 Hasil Kuesioner Kriteria 7.....	84
Gambar 4.18 Dokumentasi penyebaran Kuesioner	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah instrumen yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap unit kerja dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan Laporan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik dan melembaga.

Selain itu, dalam upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Instansi Pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai Unit Eselon III yang berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dibawah Direktorat Jenderal Marga Kementerian PUPR berkewajiban membuat LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada kinerja Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dan sasaran menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan kedalam Penetapan 9Kinerja (PK), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKIP menjadi dokumen untuk

mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolak ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan bidang jalan dan jembatan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 124 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- b. Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- c. Pelaksanaan uji laboratorium lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- e. Pengembangan sistem monitoring bidang struktur dan perkerasan dan lingkungan jalan; dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

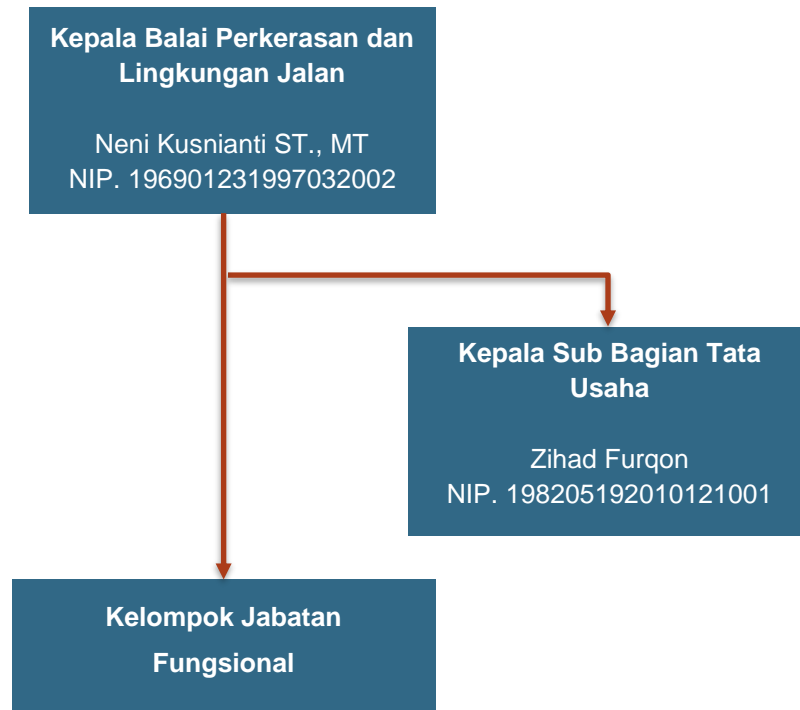
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Dalam rangka mengoptimalkan evaluasi kinerja dalam menjalankan organisasi tersebut, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh 3 (tiga) Ketua Tim. Ketua Tim adalah pejabat fungsional dan non fungsional yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi, kegiatan layanan teknis, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi dan kegiatan layanan teknis, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta pengendalian dokumen atau output. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini selalu berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Bidang Keahlian dalam upaya pencapaian output agar sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020, BPLJ merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan. BPLJ berperan dalam penyediaan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis kepada *stakeholders*, terutama unit-unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga seluruh Indonesia, dan yang terkait di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, serta peralatan survei.

Dalam pemenuhan tugas dan fungsinya, BPLJ tentunya menghadapi tantangan dalam upaya pemenuhan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Pada Tahun Anggaran 2023, isu-isu strategis yang dihadapi BPLJ selain dari pelaksanaan pekerjaan rutin,

juga menghadapi pekerjaan yang bersifat direktif sejalan dengan upaya peningkatan konektivitas jaringan jalan, sebagaimana berikut:

1.4.1 Keselamatan Dan Geometrik Jalan

Beberapa permasalahan terkait keselamatan dan geometrik jalan masih menjadi topik utama yaitu kelandaian tinggi akibat kondisi topografi Indonesia yang cenderung berupa perbukitan dan pegunungan, keselamatan truk yang hilang kendali pada turunan curam, keberadaan jalur penyelamat darurat eksisting yang belum sesuai dengan pedoman terbaru, keberadaan objek bahaya sisi jalan (kaku), serta geometrik persimpangan jalan yang belum optimal baik persimpangan sebidang maupun .

1.4.2 Over Dimension Over Loading (ODOL)

Masih berkaitan dengan isu strategis keselamatan, kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) 2023 mengenai penertiban batas muatan dan dimensi kendaraan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memperkecil risiko percepatan kerusakan infrastruktur jalan. Bina Marga sebagai penyelenggara jalan memerlukan data beban sumbu kendaraan dan jenis kendaraannya yang merepresentasikan kondisi di lapangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan preservasi jalan yang tepat mutu dan tepat anggaran serta dalam menentukan kebijakan bina marga untuk mendukung Zero ODOL.

1.4.3 Kemantapan Jalan Nasional

Dalam proses mencapai kemantapan jalan nasional, penyediaan drainase yang merupakan salah satu kelengkapan jalan yang berperan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air. Data aset dan kondisi drainase jalan perlu untuk memiliki sebuah standar keberfungsian yang dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemrograman penanganan drainase jalan. Dukungan dari teknologi informasi dapat menjadi salah satu kunci untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan inventarisasi, inspeksi, serta penilaian kondisi dan program penanganan drainase jalan yang terpadu dalam suatu aplikasi sistem informasi manajemen drainase jalan yang mengedepankan kepastian mutu dan ketepatan anggaran sehingga lebih efisien.

1.4.4 Harmonisasi Antar Standar Acuan

Standar acuan dalam pekerjaan konstruksi jalan memastikan bahwa jalan yang dibangun memiliki kualitas yang telah terjamin kehandalannya. Namun pada prakteknya, masih terdapat standar acuan yang belum saling terintegrasi dalam implementasi penerapan di lapangan. Sebagai contoh acuan untuk desain perkerasan jalan antara Spesifikasi Umum dan Manual Desain Perkerasan (MDP) beserta suplemen MDP masih memiliki perbedaan yang

menimbulkan dualisme standar bagi perencana dan kontraktor dalam pelaksanaan konstruksi jalan. Manual Desain Perkerasan Jalan dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) dan Spesifikasi Umum Jalan Tol 2020 juga menunjukkan bahwa jalan tol dan jalan non tol didesain dengan standar yang berbeda. Untuk memberikan kepastian hukum dan standar acuan yang jelas, maka perlu dilakukan harmonisasi beberapa standar sehingga tercipta acuan yang saling terintegrasi dalam satu payung hukum.

1.4.5 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pra sampai Pasca Konstruksi

Dampak pembangunan jalan mulai dari pra konstruksi sampai pasca konstruksi terhadap lingkungan masih selalu menjadi permasalahan yang perlu diminimalkan. Kebijakan pembangunan jalan yang berkelanjutan masih memerlukan panduan untuk memudahkan penyelenggara jalan memahami pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selaras dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.4.6 Kinerja Perkerasan Jalan

Penurunan kondisi perkerasan jalan tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan karena beban lalu lintas yang melewatinya dan efek dari lingkungan (cuaca, suhu, dll.). Untuk melakukan evaluasi kinerja struktur perkerasan yang tepat mutu dan tepat anggaran, maka diperlukan pemodelan penurunan kondisi perkerasan baik perkerasan kaku maupun perkerasan lentur yang mewakili beban lalu lintas di Indonesia.

1.4.7 Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN)

Permasalahan terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri, penggunaan e-katalog, dan kebijakan *refocusing* anggaran masih menjadi tantangan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPLJ. Pengadaan barang dan jasa telah memperhatikan penggunaan produk dalam negeri dan e-katalog, namun pengadaan alat survei impor menjadi sulit untuk dilakukan. Tantangan untuk memperoleh kualitas yang distandarkan dihadapkan pada keterbatasan produk dalam negeri yang mampu mendukung kegiatan BPLJ. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor.

1.5 Sistematika Laporan

Dalam penyajian laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdapat sistematika pelaporan meliputi:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum organisasi meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, aspek strategis dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2023, metode pengukuran dan target kinerja BPLJ tahun 2023 menurut Renstra

Bab III Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2023 yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, paket diresmikan dan penghargaan, serta hasil survei kepuasan masyarakat layanan publik.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023, Data Catatan Kaki Laporan Kinerja, dan Dokumentasi.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ

2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

VISI (Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR yang andal, responsif, inovatif dan profesional dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI (Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian PUPR kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian PUPR yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan mendapatkan amanah untuk meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan

pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing dengan sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km). Sehingga misi Direktorat Jenderal Bina Marga dirumuskan sebagai berikut:

Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN jalan nasional;

M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN jalan nasional;

Adapun penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020–2024 adalah:

1. Misi 1 (M.1) merupakan misi yang berkaitan dengan komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia 2020–2024 yang melalui RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km. Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.
2. Misi 2 (M.2) merupakan misi internal (yang menjadi institution concern) berkaitan dengan upaya dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya (secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Dimana cakupan kegiatan penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020–2024 terdiri dari 4 (empat) butir sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Adapun sasaran strategis Ditjen Bina Marga tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional

- a. Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan nasional;
 - b. Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol; dan
 - c. Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas manajemen birokrasi yang professional dan akuntabel, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Ditjen Bina Marga, pada tahun 2020–2024, program kegiatan di BPLJ bertujuan untuk:

1. Melakukan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan dalam mengatur dan membina penyelenggaraan jalan dan jembatan berupa 5 (lima) dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan dan 100% tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik; serta
2. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen birokrasi Ditjen Bina Marga.

Sasaran kegiatan BPLJ merupakan penjabaran dari tujuan sebagai ukuran tercapainya hasil (output) kegiatan dalam periode lima tahun ke depan (2020–2024). Untuk dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan pengguna layanan dari BPLJ maka dirumuskan sasaran kegiatan BPLJ tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan dengan indikator kinerja dihitung dari jumlah teknologi yang dihasilkan; dan
2. Terlaksananya pengujian laboratorium dan advis teknik dengan indikator tingkat fasilitasi 100%.

Sasaran dan indikator kinerja kegiatan BPLJ tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat melalui *cascading* pada Tabel 2.1. Sedangkan untuk jumlah output dari indikator kinerja kegiatan dirangkum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024)

SS	IKSS	SP	IKSP	SK	IKK	Output Fisik	Output Non Fisik
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik
			Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)		Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik		
			Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)				
		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
						Layanan Dukungan Manajemen Satker	
						Layanan Perkantoran	

Keterangan:

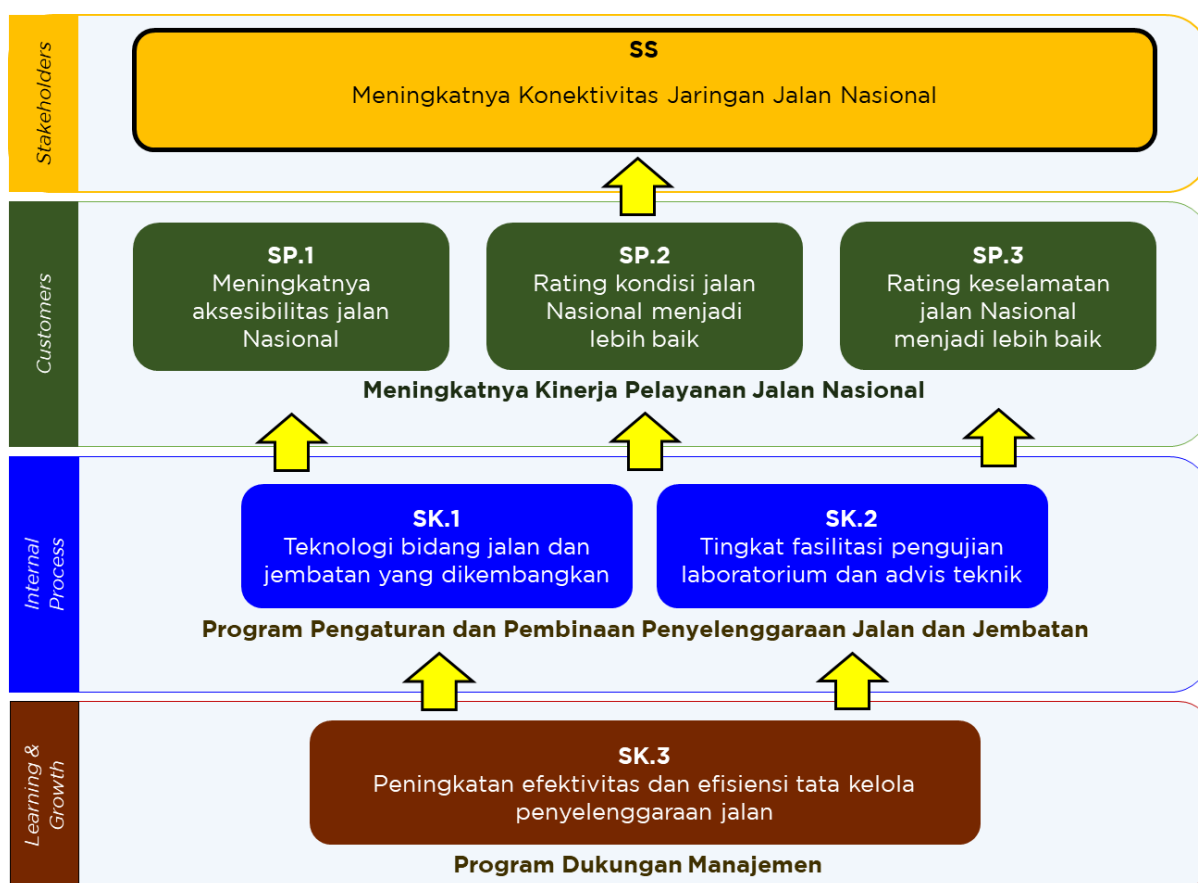
- SS Sasaran Strategis
- IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- SP Sasaran Program
- IKSP Indikator Kinerja Sasaran Program
- SK Sasaran Kegiatan
- IKK Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN								
KEGIATAN: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan							
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah	1	1	1	1	1	5
Output	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Output	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik	Dokumen	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker							
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
3	Layanan Perkantoran							
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Dalam melaksanakan kegiatan, BPLJ melakukan beberapa pendekatan prespektif dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dalam merumuskan sasaran. Sasaran kegiatan dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ

BPLJ akan mendukung secara penuh strategi implementasi dari arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk periode 2020 hingga 2024. Arah kebijakan dan strategi BPLJ adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan penerapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan

Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi yang dilakukan untuk mendukung direktorat-direktorat di Ditjen Bina Marga di bidang perkerasan dan lingkungan jalan. Kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di BPLJ adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
- 2) Pemenuhan SDM dengan jabatan fungsional perekayasa untuk menunjang kegiatan keperekayasaan bidang perkerasan dan lingkungan jalan
- 3) Peningkatan kerjasama dengan perusahaan, universitas, atau instansi lain yang bergerak di bidang iptek perkerasan dan lingkungan jalan
- 4) Penyusunan kajian kebijakan untuk mendukung penyusunan NSPK di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
- 5) Pelaksanaan kajian kesiapterapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan untuk nya di Indonesia
- 6) Pelaksanaan kliring teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan

b. Pelaksanaan layanan teknis

Layanan teknis BPLJ meliputi penilaian kualitas konstruksi, pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, dan mitigasi bencana di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survei atau inspeksi serta layanan pengujian laboratorium untuk mendukung balai pelaksana jalan. Kegiatan layanan teknis dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas konstruksi melalui penyediaan pengujian dan kalibrasi baik di laboratorium maupun di lapangan;
- 2) Pelaksanaan advis teknis terkait permasalahan di lapangan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan;
- 3) Penyusunan rekomendasi teknis untuk kajian permasalahan di lapangan yang mendalam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan; dan
- 4) Pelaksanaan mitigasi bencana alam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan.

c. Penerapan zona integritas

- 1) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) zona integritas yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penataan Tata Laksana, dan Sekretariat;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai dan stakeholder terkait tentang Zona Integritas; dan
- 3) Penyelenggaraan kegiatan yang bersih dari KKN.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) BPLJ Tahun 2023 mengalami satu kali perubahan yaitu PK Awal dan PK Revisi. PK Awal ditetapkan pada bulan Januari 2023, sedangkan PK Revisi disusun pada bulan November 2023 setelah adanya perubahan revisi DIPA BPLJ revisi 6. Adapun Perbandingan PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Sedangkan dokumen PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

Tabel 2.3 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Outcome)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional					
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	

Tabel 2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (*Output*)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan					
		%	100	100	
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola					
		%	100	100	
2	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	
3	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	
4	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	
5	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022		Target 2023		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
	IKK : Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	100,00	%	
	Parameter <i>Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00	%	100,00	%	
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	
	Rincian Output					
ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100	%	100,00	%	
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00	%	100,00	%	
	Rincian Output					
	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	1,00	Layanan
	EBA 962	Layanan Umum	1,00	Layanan	1,00	Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	1,00	Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	1,00	Unit	

Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran
 Rp 7.083.263.000
 Rp 4.372.703.000
 Rp 11.455.966.000

Total Anggaran

 Hedy Rahadian

Jakarta, 06 Januari 2023
 Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

 Neni Kusnianti

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022		Target 2023		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
	IKK : Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	100.00	%	
	Parameter <i>Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100.00	%	100.00	%	
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1.00		1.00		
	Rincian Output					
ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100	%	100.00	%	
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100.00	%	100.00	%	
	Rincian Output					
	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	1.00	Layanan
	EBA 962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.00	Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.00	Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit	1.00	Unit	

Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Total Anggaran

Anggaran
 Rp 7.383.263.000
 Rp 4.372.703.000
 Rp 11.755.966.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Bandung, 05 Desember 2023
 Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Neni Kusnianti

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2023

2.3 Target Kinerja Tahun Berjalan BPLJ

Penyusunan target kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan yaitu Renstra Bina Marga tahun 2020-2024 dan Renstra Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2020-2024, adapun target kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.5.5 dan Tabel 2.6.6.

Tabel 2.5 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PK AWAL	PK AKHIR	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Rating Keselamatan Jalan Nasional					
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	1	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	100	

Tabel 2.6 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PK AWAL	PK AKHIR	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional						
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
2	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	
3	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	
4	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	
5	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	

Adapun indikator kinerja utama yang berlaku secara internal di BPLJ disusun sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan operasional sehingga memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bond*) disajikan dalam Tabel 2.7.7.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN							
KEGIATAN: Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
INDIKATOR KINERJA UTAMA: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan							
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan kajian teknologi bidang jalan dan jembatan						
<i>Output</i>	Penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan	%	90	90	90	90	90
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik						
<i>Output</i>	Kepuasan pelanggan	%	80	82	85	87	90

Output dari pelaksanaan kajian teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan adalah persentase penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan ke direktorat-direktorat Ditjen Bina Marga, balai pelaksana jalan, dan instansi lain yang terkait dengan perkembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan setiap tahunnya.

Output dari pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik adalah persentase kepuasan pelanggan yang layanannya diterima oleh balai perkerasan dan lingkungan jalan setiap tahunnya (rerata Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan dalam satu tahun).

Dalam menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi di dalam proses internal balai untuk memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers*, maka diperlukan upaya tata pengelolaan sumber daya melalui proses *learning and growth*, yang meliputi:

1. Peningkatan terhadap layanan sarana dan prasarana internal;
2. Peningkatan terhadap layanan
3. Peningkatan terhadap layanan umum; dan
4. Peningkatan terhadap layanan perkantoran

Layanan sarana dan prasarana internal merupakan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seperti rehabilitasi gedung, pembangunan fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan peralatan, mesin, maupun sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi

BPLJ. Output dari layanan sarana dan prasarana internal adalah 1 unit. Layanan organisasi dan tata kelola internal merupakan kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan seperti pelaksanaan administrasi ketatausahaan balai, dan pembangunan zona integritas. Output dari layanan ini adalah 1 layanan. Layanan umum merupakan kegiatan administrasi kesatkeran dan operasional pimpinan. Output dari layanan ini adalah 1 layanan. Layanan Perkantoran terdiri dari kegiatan pengadministrasian dan pengelolaan gaji/tunjangan, dan honorarium ASN, penggajian pegawai pemerintah non pegawai negeri, serta penyelenggaraan operasional rutin kantor dan pemeliharaan fasilitas. Output dari layanan ini adalah sebanyak 1 layanan selama 12 bulan (1 tahun).

2.4 Metode Pengukuran

Dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan pengguna layanan BPLJ maka sebagai salah satu persyaratan terciptanya kinerja yang terencana dan terukur, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada setiap tahun anggaran sehingga dapat menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Capaian kinerja setiap indikator kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen Lakin (Laporan Kinerja) pada tiap tahunnya. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan, juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan dan ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

Pengukuran kinerja kegiatan diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan dilakukan dengan cara menghitung realisasi output terhadap target capaian setiap indikator di tahun berjalan, serta mengubahnya ke dalam persentase untuk mengetahui tingkat pencapaian setiap output tersebut, kemudian dijumlahkan untuk seluruh indikator dan dirata-ratakan. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja keseluruhan yang terdapat pada Renstra Dirjen Bina Marga 2020-2024 dihitung dari rerata persentase indikator:

- a. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan (1 dokumen);
- b. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik (100%);

Rumus untuk menghitung persentase capaian kinerja keseluruhan adalah sebagai berikut:

$$\sigma = \frac{a + b}{2}$$

Output dari parameter Teknologi Bidang Jalan dan jembatan yang dikembangkan adalah 1 (satu) dokumen setiap tahunnya yang berisi beberapa kajian kebijakan, rekomendasi teknis, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh Balai Pelaksana Jalan siap untuk diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk Parameter tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik, output berupa 1 (satu) dokumen per tahun dengan rincian beberapa pengujian dan advis teknik yang difasilitasi. Tingkat fasilitasi pelayanan dengan presentase 100% yaitu dengan dasar penilaian adalah sebagai jumlah pengujian dan advis teknik yang direspon oleh BPLJ baik itu diterima maupun ditolak.

2. Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah target dengan jumlah capaian Kinerja. Pengukuran kinerja terhadap output kegiatan dilakukan dengan membandingkan jumlah output yang dicapai pada tahun anggaran berjalan dengan target keseluruhan Renstra, kemudian diubah menjadi bentuk persentase. Perhitungan capaian output dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Output} = \frac{\text{Capaian Output Tahun Berjalan}}{\text{Target Jumlah Output Keseluruhan}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian parameter indikator kinerja teknologi jalan dan jembatan yang dikembangkan disusun berupa pelaporan pengkajian kebijakan maupun teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan yang dikembangkan yang disusun dalam bentuk dokumen Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Sedangkan pencapaian parameter indikator kinerja tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik diukur dengan membandingkan jumlah layanan teknis yang ditindaklanjuti (diterima/ditolak) dibandingkan terhadap jumlah permohonan layanan teknis.

$$\text{Tingkat Fasilitasi Layanan Teknis} = \frac{\text{Jumlah Layanan Teknis yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Teknis}} \times 100\%$$

3. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Internal

Agar didapat pengukuran kinerja yang sesuai dengan ketentuan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bond*), BPLJ menyusun metode pengukuran kinerja internal yang didasarkan atas parameter indikator kinerja utama BPLJ. Metode perhitungan parameter untuk setiap indikator teknis pada tahun 2023 disesuaikan melalui SK Penetapan

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan beserta Perubahannya yang dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Pengukuran Indikator Kinerja 2023 BPLJ

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Penjelasan Pengukuran
1.	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah diterapkannya kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan}}{\text{Jumlah kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100$
2.	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

Untuk selanjutnya pencapaian masing-masing parameter dibandingkan dengan target yang mengacu kepada Rencana Strategis Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024.

Perhitungan persentase output diperoleh dari membagi jumlah penerapan kajian dengan jumlah kajian yang disampaikan dalam satu tahun. Penerapan diukur melalui surat penyampaian ke *stakeholder* yang membutuhkan, pelatihan, sosialisasi yang berisi beberapa kajian teknologi, rekomendasi kebijakan, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan lingkungan jalan yang selanjutnya diterapkan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* terkait khususnya Direktorat Bina Teknik dan Balai Pelaksana Jalan telah diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik, output diukur dari persentase kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan BPLJ. Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

4. Penanggung jawab pengumpulan data dan pengukuran kinerja

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2022, dilakukan oleh Tim Penyelenggara SAKIP BPLJ sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Perkerasan dan

Lingkungan Jalan Nomor: 13/KPTS/Bb.37/2023. Tim Penyelenggara SAKIP BPLJ tahun 2022 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat.

Terkait dengan pengumpulan data dan pengukuran kinerja, masing-masing bagian Tim turut bekerjasama dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja, yang terdiri dari:

1. Tim Sekretariat memiliki tugas untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP serta membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan penyelenggaraan SAKIP.
2. Tim Pelaksana bertugas untuk menyusun dokumen-dokumen SAKIP seperti Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, SK Indikator Kinerja Utama, Laporan Monev Bulanan, serta LKIP yang didalamnya berisi pengukuran Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
3. Pengarah menjadi penentu dalam memberikan pengarahan penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh.

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dibagi ke dalam beberapa rumpun keahlian, yaitu:

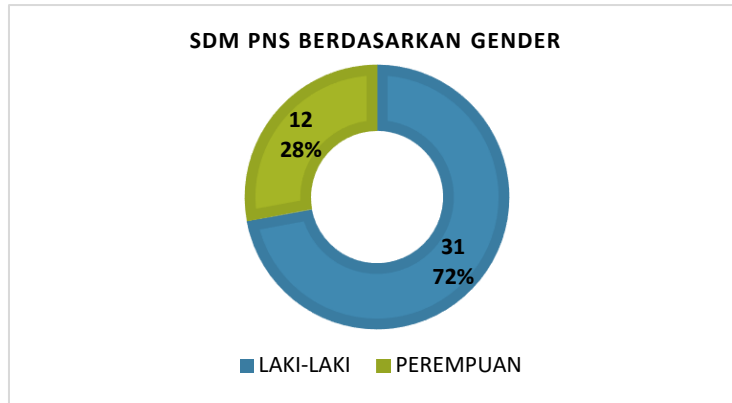
- a. Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan Jalan yang meliputi perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan sistem manajemen perkerasan jalan;
- b. Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas yang meliputi geometri jalan, keselamatan, analisa beban lalu lintas, kapasitas jalan dan perlengkapan jalan;
- c. Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan Jalan yang meliputi drainase jalan, lingkungan jalan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, serta jalan berkelanjutan;

Semua rumpun tersebut didukung oleh SDM di bidang instrumentasi sebagai upaya untuk pengembangan alat dan software yang dapat membantu penyelenggara jalan.

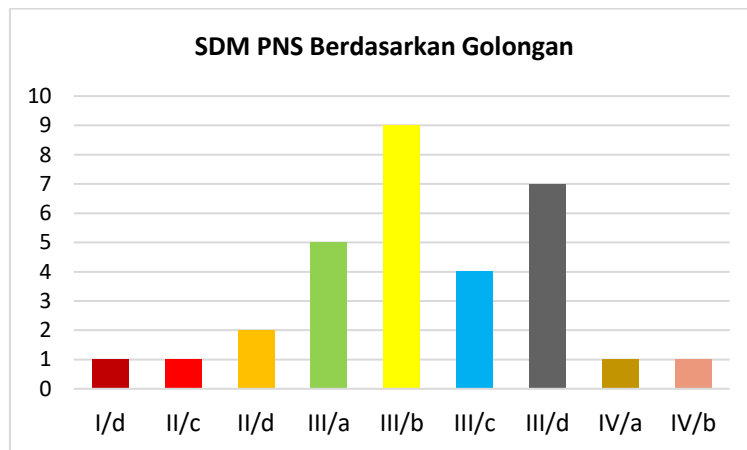
Secara keseluruhan jumlah Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah 68 orang yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 Orang PPPK, 15 orang Non Pegawai Negeri Sipil, dan 7 orang Konsultan Individu.

3.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sampai akhir Tahun 2023 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (dua belas) orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan golongan pegawai, pegawai BPLJ di dominasi oleh golongan III/b sejumlah 11 (sebelas) orang dan golongan III/d sejumlah 10 (sepuluh). Data tersebut beserta pengelompokan lainnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

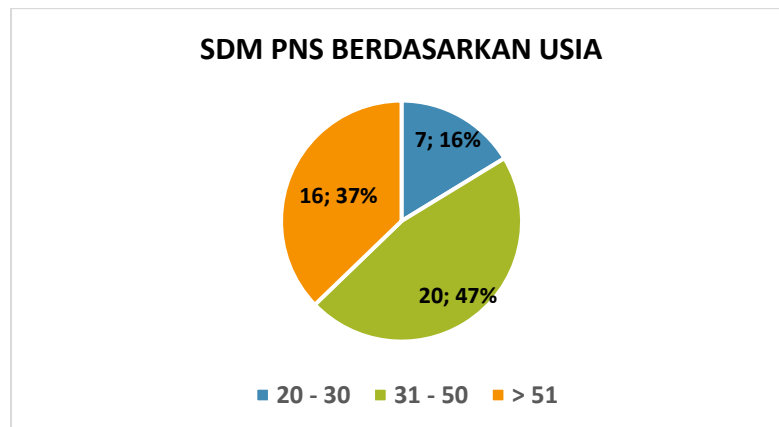


Gambar 3.1 SDM PNS Berdasarkan Gender

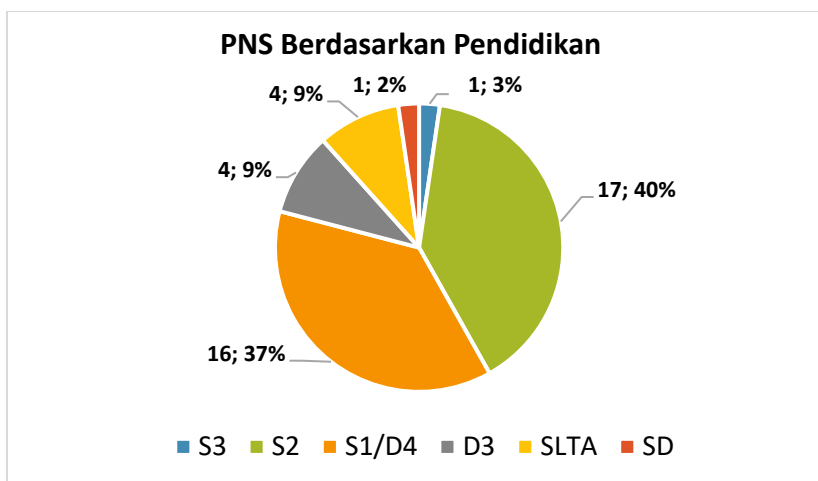


Gambar 3.2 SDM PNS Berdasarkan Golongan

Komposisi PNS berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 3.3 **Error! Reference source not found.** Sedangkan komposisi PNS Tahun 2023 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.4

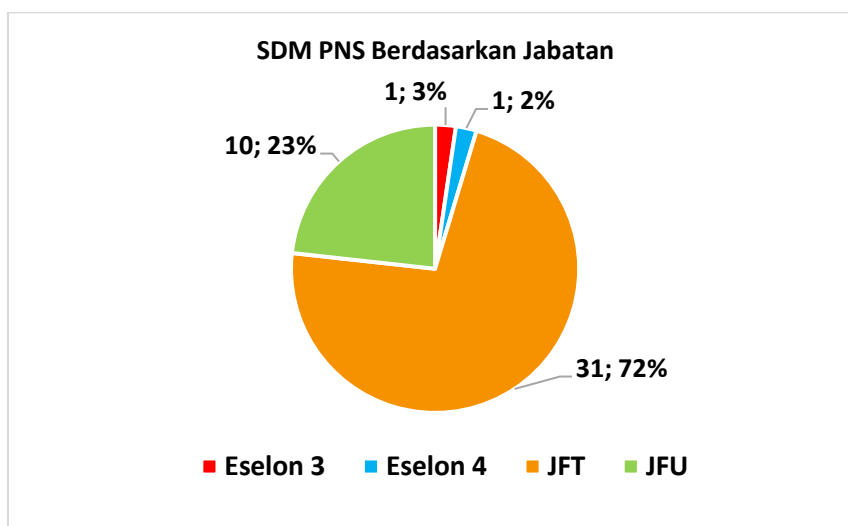


Gambar 3.3 SDM PNS Berdasarkan Usia



Gambar 3.4 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan

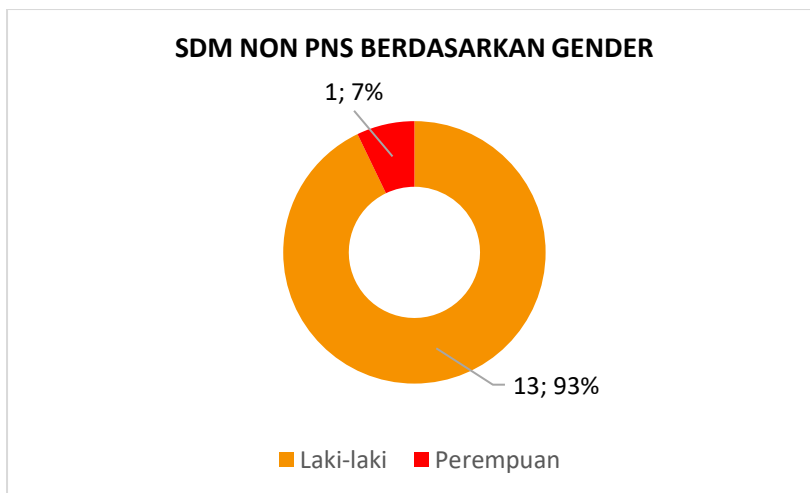
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdiri dari eselon 3 yaitu Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, eselon 4 yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, serta 31 orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Teknis dan 10 orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Umum. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.5



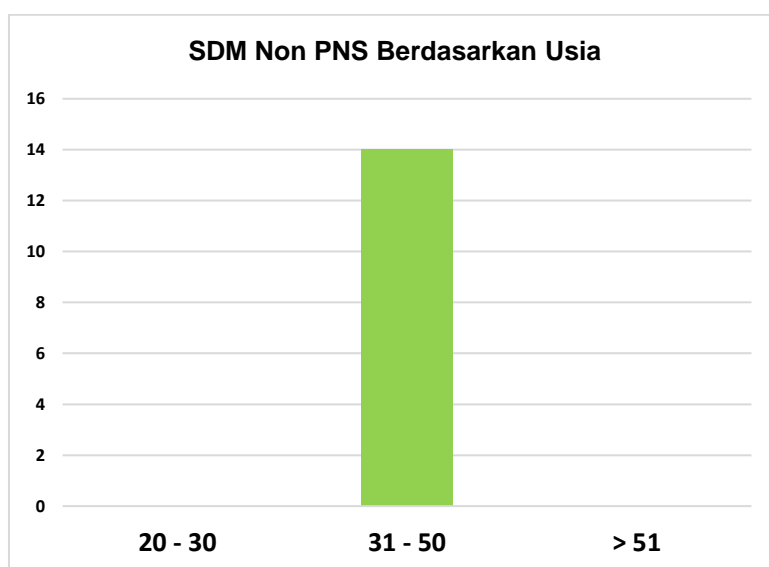
Gambar 3.5 SDM PNS Berdasarkan Jabatan

3.1.2 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

Jumlah Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 14 orang yang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.6 sedangkan komposisi Pegawai Non-PNS Tahun 2023 berdasarkan usia terdiri 14 orang berusia 31-50 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.7.

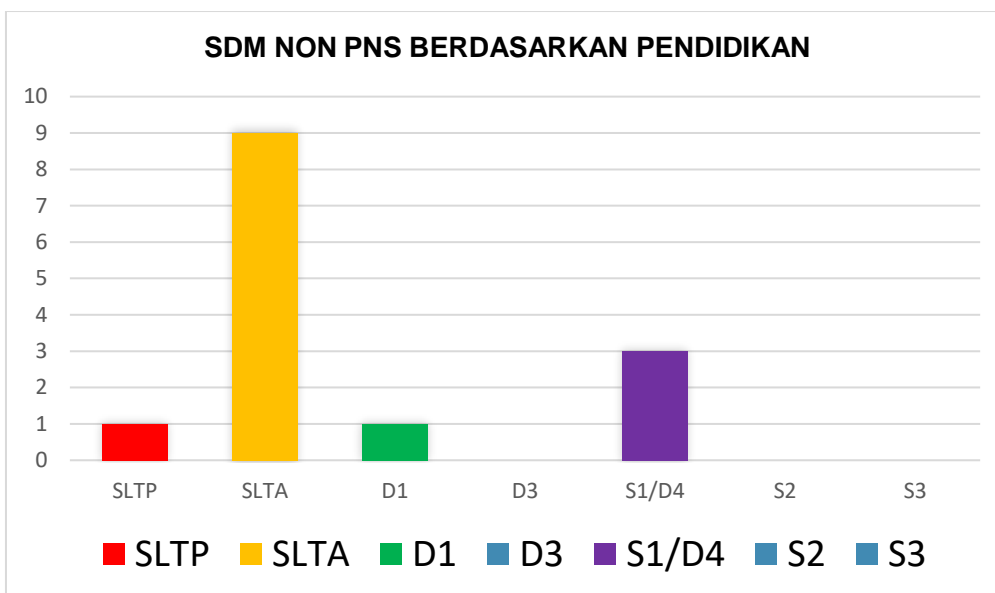


Gambar 3.6 SDM Non PNS Berdasarkan Gender

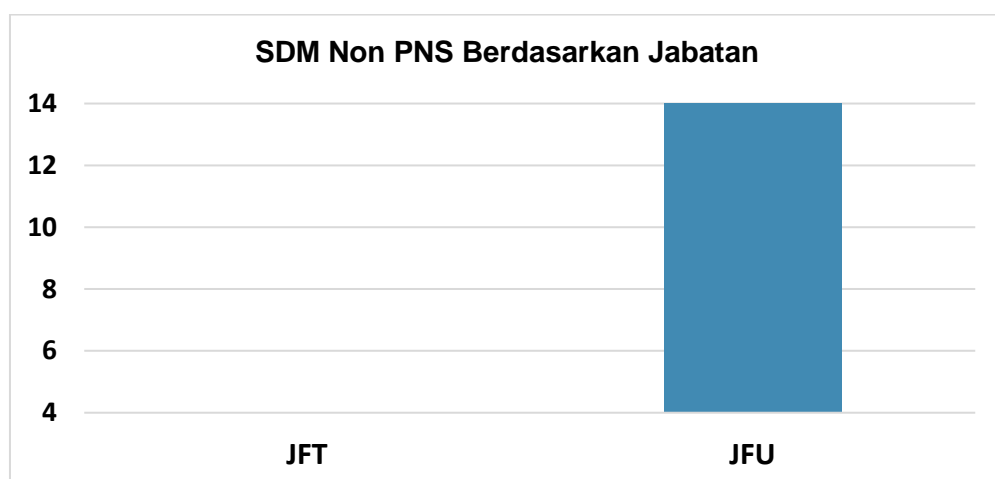


Gambar 3.7 SDM Non PNS Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 1 orang tingkat SLTP, 9 orang tingkat SLTA, 1 orang tingkat D3, 1 orang tingkat D1, 3 orang tingkat S1/D4 yang dapat dilihat pada Gambar 3.8. Sedangkan Komposisi Pegawai Non-PNS berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.9.



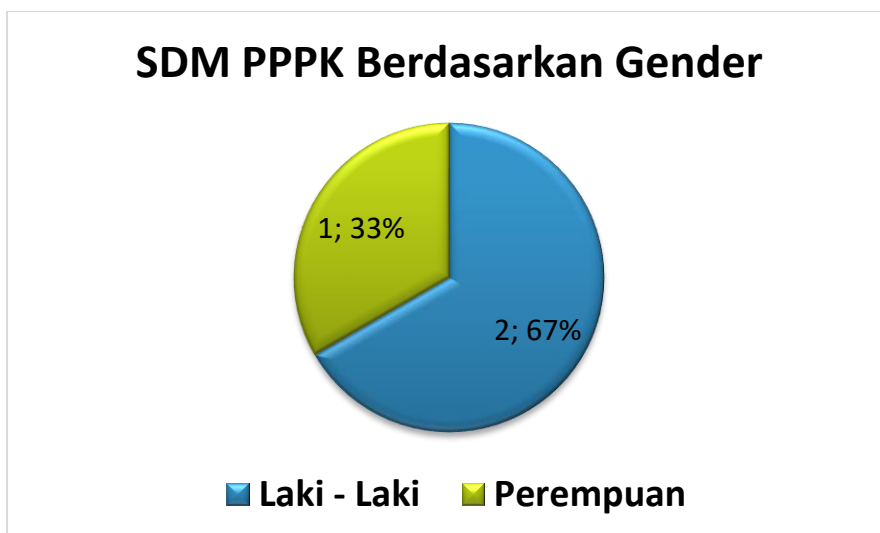
Gambar 3.8 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan



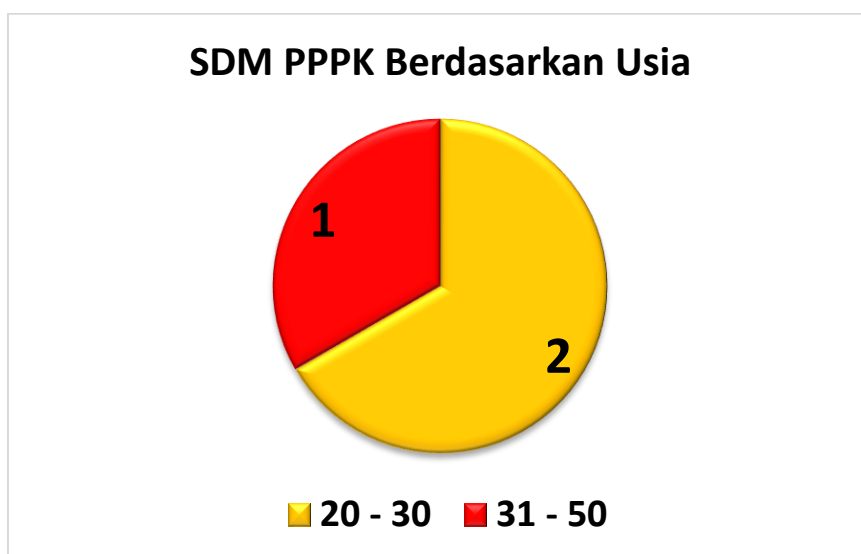
Gambar 3.9 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan

3.1.3 PPPK

Jumlah Pegawai PPPK Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.10, sedangkan komposisi Pegawai PPPK Tahun 2023 berdasarkan usia terdiri dari 2 orang berusia 20 - 30 tahun (67%), dan 1 orang berusia 31-50 tahun (33%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11.

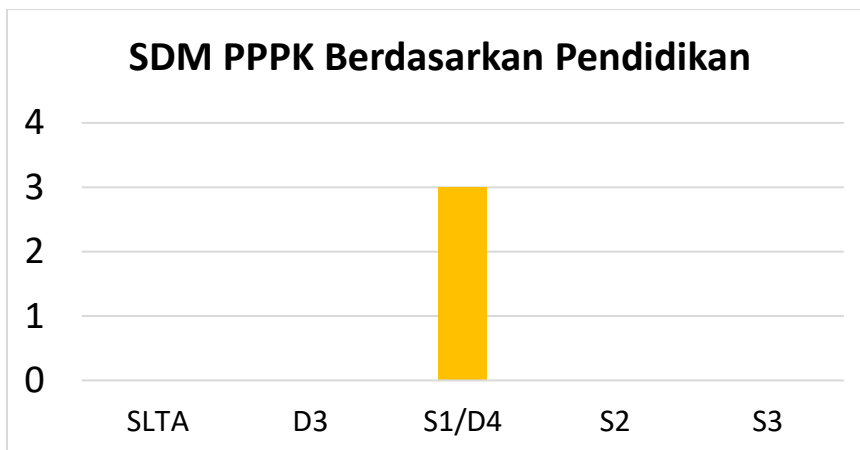


Gambar 3.10 SDM PPPK Berdasarkan Gender

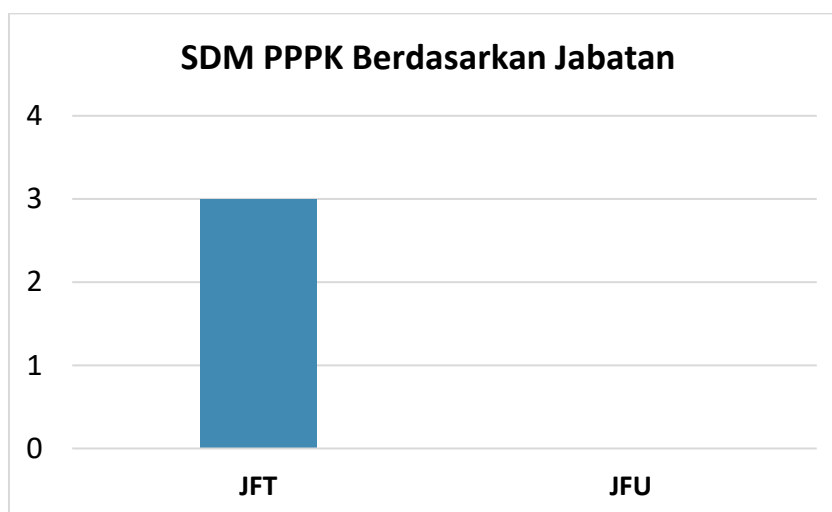


Gambar 3.11 SDM PPPK Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai PPPK Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 3 orang tingkat S1/D4 yang dapat dilihat pada Gambar 3.12 Sedangkan Komposisi Pegawai PPPK berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.13.



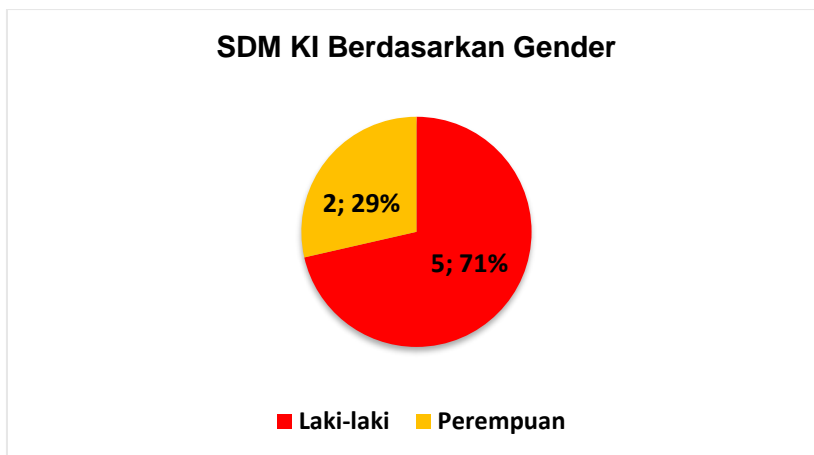
Gambar 3.12 SDM PPPK Berdasarkan Pendidikan



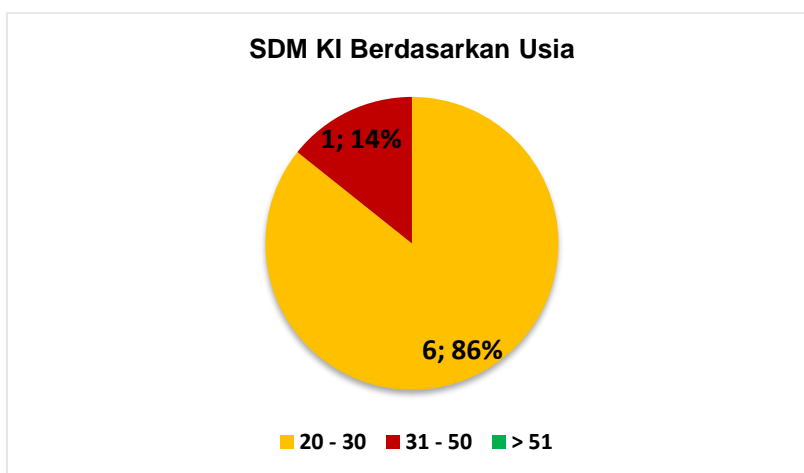
Gambar 3.13 SDM PPPK Berdasarkan Jabatan

3.1.4 Konsultan Individu

Jumlah Pegawai Konsultan Individu Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 7orang yang terdiri dari 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.14, sedangkan komposisi berdasarkan usia terdiri dari 6 orang berusia 20-30 tahun dan 1 orang berusia 31-50 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.15. Dalam kategori Pendidikan, KI dengan jenjang S1 terdiri dari 7orang.



Gambar 3.14 SDM KI Berdasarkan Gender



Gambar 3.15 SDM KI Berdasarkan Usia

3.2 Sarana Prasarana

Aset BMN yang dimiliki Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dari Bulan Januari 2023 – Desember 2023. Adapun data rincian aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan per bulan Desember dapat dilihat berdasarkan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		456	3,239,841,635	82	725,479,580	3	17,834,000	535	3,947,487,215
3010305	POMPA	-	2	5,649,900	2	5,068,640	0	0	4	10,718,540
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	-	0	0	1	38,792,784	0	0	1	38,792,784
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	1	1,429,680	0	0	0	0	1	1,429,680
3030204	PERKAKAS PENGANGKAT	-	2	11,266,500	0	0	0	0	2	11,266,500
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	-	6	11,555,100	0	0	0	0	6	11,555,100
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	-	0	0	1	4,051,500	0	0	1	4,051,500
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	-	6	24,475,500	0	0	0	0	6	24,475,500
3030307	UNIVERSAL TESTER	-	0	0	1	3,446,550	0	0	1	3,446,550
3030310	ALAT TIMBANGAN/BIARA	-	2	155,562,000	0	0	0	0	2	155,562,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	23	88,807,076	11	27,541,811	0	0	34	116,348,887
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	19	96,293,027	0	0	0	0	19	96,293,027
3050201	MEUBELAIR	-	178	443,390,680	18	77,882,000	2	2,899,000	194	518,373,680
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	18	48,117,764	0	0	0	0	18	48,117,764
3050204	ALAT PENDINGIN	-	19	206,284,250	6	60,883,500	0	0	25	267,167,750
3050205	ALAT DAPUR	-	3	3,388,000	0	0	0	0	3	3,388,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	51	540,026,050	8	93,684,120	0	0	59	633,710,170
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	1	4,026,000	0	0	0	0	1	4,026,000
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	5	117,206,900	3	25,010,450	0	0	8	142,217,350
3060104	PERALATAN CETAK	-	1	3,905,000	0	0	0	0	1	3,905,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	17	60,370,000	3	15,347,100	0	0	20	75,717,100
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	3	5,970,000	0	0	0	0	3	5,970,000
3080106	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	-	2	8,668,000	0	0	0	0	2	8,668,000
3080156	ALAT LABORATORIUM LAINNYA	-	1	8,613,000	0	0	0	0	1	8,613,000
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	-	0	0	1	20,930,000	0	0	1	20,930,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	64	1,268,090,090	20	324,331,325	1	14,935,000	83	1,577,486,415
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	7	16,511,000	0	0	0	0	7	16,511,000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	22	100,424,118	7	28,509,800	0	0	29	128,933,918
3110102	UKUR/INSTRUMENT	-	2	4,972,000	0	0	0	0	2	4,972,000
3190102	PERALATAN PERMAINAN	-	1	4,840,000	0	0	0	0	1	4,840,000
135111	Aset Tetap Renovasi		0	0	2	286,507,986	2	286,507,986	0	0
6070301	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	-	0	0	2	286,507,986	2	286,507,986	0	0
TOTAL				3,239,841,635		1,011,987,566		304,341,986		3,947,487,215

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Selama Tahun Anggaran 2023, terdapat 6 (enam) kali revisi anggaran. DIPA Awal tahun 2023 disahkan pada tanggal 30 November 2022, yang merupakan DIPA awal pada Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Komposisi DIPA Awal TA.2023 diantaranya RPM sebesar Rp. 11.455.966.000,- . Pagu terakhir Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebesar Rp. 11.755.966.000,- dengan komposisi seluruhnya RPM dapat dilihat pada Tabel 3.2. Kronologis perubahan DIPA Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan TA.2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Perubahan DIPA selama Tahun 2023 secara garis besar dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang mendesak yang belum dialokasikan sebelumnya. Pagu anggaran tahun 2023 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya akibat adanya kebijakan belanja barang dan modal diharuskan memiliki TKDN, sehingga terdapat beberapa kegiatan tertunda karena perbaikan harus mendatangkan barang dari luar negeri yang tidak memiliki TKDN. Pada akhir tahun Balai perkerasan dan lingkungan Jalan mendapatkan tugas direktif untuk pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi jalan lingkaran gedung Carro di lingkungan kampus Dit Bina Teknik. Berdasarkan tugas tersebut diperlukan penambahan alokasi anggaran berupa belanja modal.

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2023

NO	UNIT KERJA	SUMBER DIPA			
		RPM	PHLN	SBSN	TOTAL
1	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	11.755.966.000	0	0	Rp 11.755.966.000
JUMLAH		11.755.966.000	0	0	Rp 11.755.966.000

Tabel 3.3 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2023

NO	DIPA AWAL/ REVISI	NILAI DIPA AWAL/ SEMULA	JENIS REVISI					Kenaikan/ Penurunan	NILAI DIPA AKHIR/ MENJADI	ALASAN/PENYEBAB REVISI
			DJA	KANWIL	POK	DIGITAL STAMP	TANGGAL PENGESAHAN			
1	DIPA Awal	11.455.966.000	V			0010-0396-2386-0792	30/11/2022		11.455.966.000	Pagu awal TA. 2023
2	Revisi ke-1	11.455.966.000		V		0010-0396-2386-0792	15/02/2023		11.455.966.000	- Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
3	Revisi ke-2	11.455.966.000		V		0010-0396-2386-0792	15/04/2023		11.455.966.000	- Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
4	Revisi ke-3	11.439.523.000		V		0010-0396-2386-0792	22/06/2023		11.455.966.000	- Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA - Optimalisasi anggaran untuk kebutuhan mendesak
5	Revisi ke-4	11.439.523.000	V			6744-0710-8050-9630	17/09/2023	+300.000.000,-	11.755.966.000	- Penambahan belanja modal untuk pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkaran gedung Carro
6	Revisi ke-5	11.755.966.000		V		6744-0710-8050-9630	17/10/2023		11.755.966.000	- Revisi Administrasi dan Pergeseran Anggaran dalam hal pagu tetap - Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
7	Revisi ke-6	11.755.966.000		V		6744-0710-8050-9630	28/12/2023		11.755.966.000	- Optimalisasi anggaran untuk kekurangan pembiayaan kegiatan dan kebutuhan mendesak lainnya

BAB 4






AKUNTABILITAS KINERJA

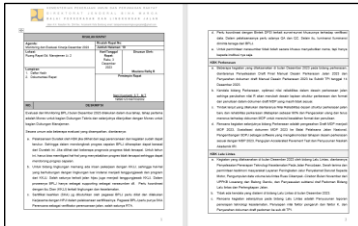

4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Hasil evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan berdasarkan Surat Nomor PW.0204-Bp/721 Perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun pelaksanaan evaluasi SAKIP BPLJ Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No 09 /PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/KPTS/Db/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2023 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Fokus evaluasi SAKIP BPLJ meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*) dengan cakupan evaluasi meliputi komponen: (1) Perencanaan Kerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. Berdasarkan penilaian komponen tersebut, maka implementasi atas SAKIP BPLJ Tahun Anggaran 2022 dikategorikan A (Memuaskan), akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan nilai angka 80,56%. Akan tetapi, terdapat beberapa catatan atas kelemahan yang masih ada, berikut adalah rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Evaluasi sebagai bahan evaluasi BPLJ, sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi Hasil Evaluasi SAKIP pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	Perencanaan Kinerja	a. Melengkapi bukti dukung pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai target kinerja.	a. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kerja 2024 sesuai dengan Renstra BPLJ	<p>- PK Revisi 2023</p>   <p>- PK 2024</p> 
		b. Melengkapi bukti dukung penyempurnaan dokumen perencanaan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik	b. Pengumpulan data perencanaan dan anggaran kegiatan revisi	<p>- Undangan Pembahasan pra penajaman program Dukungan Manajemen 2023</p>  

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
2.	Pengukuran Kinerja	Mempertahankan kinerja yang ada dan dilengkapi bukti dukung terkait untuk TA 2023	Penyusunan bukti dukung monev bulanan dan penilaian kinerja	- Undangan Rapat Monev Bulanan 
3.	Pelaporan Kinerja	Melengkapi bukti dukung pemanfaatan laporan kinerja berkala sesuai penyesuaian aktifitas	Penyusunan bukti dukung monev bulanan dan laporan paket kegiatan	- Laporan Monev Bulanan 
4.	Evaluasi Internal	Mempertahankan kinerja yang ada dan dilengkapi bukti dukung terkait untuk TA 2023	Penyusunan laporan kegiatan akhir dan laporan kinerja tahunan	- Laporan LAKIN BPLJ 2023 

Terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, BPLJ telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi



Gambar 4.1 Dokumentasi diskusi pra penajaman anggaran, Rapat Monev bulanan, Reviu Renstra BPLJ, Pembahasan Laporan Kinerja TA 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2023, Penyusunan PK 2024, dan Penyusunan LAKIN BPLJ 2023

Berikut adalah beberapa catatan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan:

- a. Pada Perencanaan Kinerja:
 - Poin a Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) revisi 2023 pada tanggal 05 Desember 2023 yang sudah disesuaikan dengan perubahan pagu anggaran BPLJ. Selain itu disusun perjanjian kinerja untuk tahun 2024 pada tanggal 16 Januari 2024 yang sudah disesuaikan dengan renstra BPLJ
 - Poin b Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah melengkapi bukti dukung penyempurnaan dokumen perencanaan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Pengumpulan dokumentasi revisi anggaran sesuai perubahan kebutuhan paket kegiatan untuk tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan
- b. Pada Pengukuran Kinerja, dalam mempertahankan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan diskusi dan pelaporan monev rutin bulanan.
- c. Pada Pelaporan Kinerja, telah disusun laporan monitoring dan evaluasi per bulan berisi uraian kegiatan dan hasil tindak lanjut terhadap bulan sebelumnya.
- d. Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah disusun laporan laporan akhir kegiatan dan laporan kinerja tahunan akan dibandingkan evaluasi internal antara LKIP Tahun 2022 dan Tahun 2023.

4.2 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur capaian kinerja, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun rencana aksi yang dimonitoring melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk monitoring terhadap pencapaian kinerja dan untuk meninjau hambatan-hambatan kinerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan program. Selain itu agar didapat pengukuran capaian kinerja yang SMART Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga menyusun SK Indikator Kinerja Utama internal yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target internal Renstra BPLJ 2020-2024. Oleh karena itu, diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat sepenuhnya tercapai. Capaian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2023 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai/diterbitkan/disampaikan dengan target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
1	Rating Keselamatan Jalan Nasional						
	Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dok	1	1	100	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	100	100	100	

Tabel 4.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN(%)		KET
			AWAL (PK REVISI)	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	100	Tercapai
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
Indikator Kinerja Kegiatan								
2	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
3	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
4	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
5	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	100	100	Tercapai

Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja internal BPLJ berdasarkan SK IKU BPLJ 2023 didapat hasil pengukuran kinerja yang ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Capaian Kinerja IKU BPLJ 2023

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Target Rensta BPLJ (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja TA 2023 (%)
1	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	90	93.33	100
2	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	87	94,48	100

Pada subbab ini dijelaskan mengenai hasil pengukuran kinerja tahun anggaran 2023 serta perbandingannya antara target revisi akhir dengan realisasi. Adapun rincian dari pencapaian Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk TA. 2023 adalah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja output yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Fasilitasi Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, BPLJ melaksanakan kegiatan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan melalui kegiatan advis teknis, pendampingan teknis, dukungan survei kondisi jalan dan jembatan, kliring teknologi, layanan PNBPN, serta layanan lainnya seperti narasumber maupun pembicara/instruktur.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, pada tahun 2023 BPLJ menerima permintaan layanan teknis sejumlah 249 layanan. Terdapat 171 layanan teknis berupa kegiatan advis teknis meliputi advis teknis diskusi, advis teknis tinjauan lapangan, dan permohonan tenaga ahli/narasumber. Advis teknis yang dilakukan umumnya berupa pemberian rekomendasi teknis atau saran terkait kerusakan atau keselamatan jalan, reviu desain jalan, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan lingkungan jalan. Sedangkan untuk kegiatan layanan pengujian pada tahun 2023 adalah sebanyak 78 layanan (PNBP dan Non PNBPN) dimana sebanyak 25 layanan PNBPN, 30 layanan non PNBPN, 6 layanan dibatalkan pelanggan, dan 17 layanan

ditolak dikarenakan keterbatasan SDM. Sampai dengan akhir Desember total nilai PNBP BPLJ sebesar Rp 412.577.860 dimana nilai tersebut telah mencapai target dari rencana Rp. 300.002.000. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian kekesatan jalan, retroreflektif rambu, ketidakrataan jalan, tekstur permukaan jalan, kalibrasi dan validasi LWD, dan validasi alat survey kondisi jalan. Selain itu juga, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menerapkan teknologi perlengkapan jalan pada pembangunan Sirkuit di lingkungan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai bentuk dukungan dicanangkannya gerakan penggunaan kendaraan listrik (*Electric Vehicle*). Sirkuit Bintek Jalan merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak (stakeholder). Sirkuit EV Bintek Jalan digunakan sebagai arena pengembangan untuk kendaraan listrik seperti Gokart, dengan adanya sirkuit ini diharapkan berbagai pihak khususnya kalangan perguruan tinggi dapat melakukan inovasi dalam pengembangan kendaraan listrik. Teknologi perlengkapan yang berkeselamatan yang diterapkan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah pagar dan struktur pendukungnya, pemasangan kanstin, penanganan timbunan dengan penyesuaian gradien dan penanaman vegetasi.



Diskusi Permohonan Narasumber Terkait Materi Geometri Jalan



Verifikasi Rencana Teknis Akhir Desain Jalan



Pengujian Retroreflektif Rambu



Pengujian Kekesatan Jalan



Kalibrasi LWD



Pengujian Tekstur Permukaan Jalan



Kalibrasi Hawkeye



Pengujian Ketidakrataan Jalan



Pemasangan Kerb Beton



Proses penanganan gradien dan pembuatan struktur pendukung pagar

Gambar 4.2 Dokumentasi Layanan Teknis

Manfaat Kegiatan:

- Membantu menyelesaikan permasalahan bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan di BB/BPJK seluruh Indonesia baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun saat jalan tersebut telah beroperasi, sehingga secara teknis, penyelenggaraan jalan tersebut dapat melayani pengguna dengan baik
- Membantu stakeholder dalam melakukan survei /pengujian dalam rangka pemenuhan parameter perkerasan jalan yang dipersyaratkan.

Kendala Kegiatan:

- Keterbatasan SDM yang memiliki level kompetensi teknis yang lebih tinggi.
- Adanya kerusakan alat uji lapangan
- Banyaknya undangan pembahasan *online* dibandingkan dengan ketersediaan SDM dan waktu pelaksanaan
- Rekaman layanan teknis lebih kecil dengan jumlah layanan teknis yang dilakukan akibat pengajuan kegiatan layanan teknis seringkali langsung menghubungi pegawai secara personal
- Proses kaji ulang permohonan dari pelanggan masih belum sesuai standar pelayanan
- ketersediaan data dukung layanan terutama dalam hal ini notulensi rapat tidak tersedia secara lengkap
- Lokasi pengujian belum memenuhi syarat (lokasi masih tahap pembersihan) untuk dilakukan pengujian
- Pekerjaan penerapan teknologi perlengkapan jalan di lingkaran gedung Carro yang didisposisikan pada triwulan 4 membutuhkan waktu dan tenaga yang bersamaan dengan penyelesaian kegiatan lainnya;
- Pada kegiatan penerapan teknologi perlengkapan jalan pada lingkaran Carro terdapat perubahan volume antara rencana di Balai Bahan dan pelaksanaannya, sehingga terdapat material sisa konstruksi.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

- Peningkatan kompetensi teknis SDM BPLJ melalui pelaksanaan *In house training* substansi teknis bidang perkerasan dan lingkungan jalan.
- Melakukan pengecekan dan perbaikan secara rutin baik yang dilakukan sendiri ataupun di bengkel
- Pemilihan jenis layanan teknis berdasarkan prioritas dan arahan pimpinan
- Sosialisasi dan internalisasi prosedur layanan teknis
- Memperbaiki waktu proses kaji ulang agar sesuai dengan standar pelayanan
- Mengingat secara berkala setiap kali ada rapat serta membuat notulensinya
- Menginformasikan kepada pelanggan untuk melakukan pengecekan lokasi pengujian terlebih dahulu
- Untuk mengoptimalkan tenaga dan waktu, maka diusulkan perekrutan tenaga konsultan untuk perencanaan dan pengawasannya

- Material sisa konstruksi diterapkan di tempat lain yang masih terletak di lingkungan kampus Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

- Dalam pelaksanaan *in house training* tidak semua pegawai mengikuti kegiatan tersebut, terdapat sebagian pegawai yang dapat memahami/menyerap materi yang disampaikan sehingga masih minim pegawai yang kompeten
- Adanya keterbatasan SDM dan beberapa penugasan pimpinan (kecenderungan *overload*), sehingga terjadi keterbatasan dalam tingkat layanan
- Masih terdapat pelanggan yang menghubungi secara personal dikarenakan pelanggan menganggap layanan lebih cepat dan pasti diterima, walaupun pada kenyataannya permintaan tersebut akan dilayani sesuai prosedur
- Pekerjaan selesai tepat pada waktunya dan material sisa telah terpasang

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

- Tingkat permasalahan lapangan yang terjadi di BBPJJ/ BPJJ perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Kompetensi masing-masing sebelum masuk ke Ditbintek/Balai Teknik
- Peningkatan kompetensi teknis SDM BPLJ melalui pelaksanaan pelatihan penggunaan alat maupun pelibatan secara langsung dalam pengujian sebagai upaya transfer knowledge
- Pengecekan dan perbaikan secara rutin baik yang dilakukan sendiri ataupun di bengkel
- Penentuan prioritas layanan
- Memperbaiki komunikasi antar personil, sistem pengarsipan, dan perlu meningkatkan profesionalisme kerja
- Peningkatan kesiapan sebelum dilakukan advis teknis dengan mengkomunikasikan kebutuhan data yang diperlukan
- Pekerjaan penerapan teknologi sebaiknya menggunakan satu koordinator pekerjaan sehingga jadwal pelaksanaan dapat terencana dengan matang antar balai-balai teknik dan lebih terkoordinasi

2. Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang Dikembangkan

Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan di lingkungan BPLJ dilakukan melalui kegiatan Paket kerja Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan (PA) yang terdiri dari Subpaket kerja Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan, Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas, Kelompok Bidang Keahlian

lingkungan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi, penyusunan pedoman, serta kajian-kajian terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan. Output Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang di kembangkan di BPLJ TA. 2023 yang dikeluarkan dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5 Output Teknologi Bidang Jalan yang Dikembangkan

No	Sub Paket Kerja	Output
1	<p>Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan</p> 	<p>Suplemen (Pedoman/Prosedur) Pelengkap Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>12 Draf Pedoman dan Prosedur (Pelengkap Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan 2) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Sensitif 3) Pedoman Penapisan Dokumen Lingkungan 4) Prosedur Penyiapan Kelengkapan Dokumen KKPR 5) Pedoman Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan 6) Prosedur Pelaksanaan Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan 7) Pedoman Sistematika Dokumen Lingkungan 8) Pedoman Pengadaan Tanah dan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 9) Prosedur Mitigasi Dampak Lingkungan Pekerjaan Jalan Tahap Konstruksi 10) Pedoman Pengisian Formulir Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 11) Pedoman Penyusunan Laporan RKPPL 12) Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL atau UKL-UPL, serta DELH/DPLH

No	Sub Paket Kerja	Output
		<p>Aplikasi INDRAIN</p> <p>Uji Coba dan Validasi Aplikasi INDRAIN (Inspeksi Cara Cepat Drainase Jalan)</p>
<p>2</p>	<p>Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas</p>	<p>Updating Beban Aktual MDP</p> <p>Survei Beban Kendaraan metode WIM dan Statis di ruas jalan daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah</p>
		<p>Kajian Distribusi Kendaraan ODOL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan diskusi internal Bina Marga untuk memperoleh arahan dari Pak Dirjen - Survei Beban Kendaraan metode Statis di Rest Area dilakukan untuk memperoleh sampel data konfigurasi sumbu dan berat sumbu dari jenis-jenis truk - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai kebijakan ODOL 2023

No	Sub Paket Kerja	Output
		
		<p>Reviu Jalur Penyelamat Darurat</p> <p>Survei Pengukuran JPD di Megamendung, Gekbrong, Ciloto, Tanjakan emen 123 Jawa Barat untuk memberikan evaluasi dan masukan terhadap JPD eksisting sesuai dengan pedoman perencanaan JPD terbaru</p>
		<p>Pedoman Desain Geometrik Simpang</p> <p>Menyusun draft pedoman mengenai perencanaan geometri simpang yang siap dibahas ditingkat SubDit</p>
		<p>Reviu Gambar Standar</p> <p>Melakukan Reviu gambar standar sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku tentang ruang-ruang bagian jalan yang diterjemahkan dalam potongan melintang penampang jalan</p>
<p>3</p>	<p>Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan</p> 	<p>Harmonisasi Manual Desain Perkerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyelaraskan manual perencanaan dengan spesifikasi pelaksanaan konstruksi; - Tersusunnya draf Manual Desain Perkerasan 2023, yang telah diharmonisasi.

No	Sub Paket Kerja	Output
		
		<p>Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ 2.0)</p> <p>Telah dilakukan launching Aplikasi SDPJ 2.0 dan penerapannya terhadap BBPJK dan BPJK seluruh Indonesia</p>
	  	<p>Test Track</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen <i>Basic Design Test Track</i>; - 3D Animasi <i>Visual Test Track</i>.

Manfaat Kegiatan:

Kegiatan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan oleh BPLJ bermanfaat untuk menjawab isu-isu dalam bidang perkerasan dan lingkungan jalan terutama yang telah

tertuang dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2019-2024. Berikut manfaat kegiatan yang dilaksanakan BPLJ pada TA. 2023.

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Manfaat dari penerapan dan penggunaan suplemen pelengkap Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan terwujudnya pembangunan dan peningkatan jalan yang ramah lingkungan dalam rangka pembangunan dan peningkatan jalan yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
 - b. Penerapan dan penggunaan sistem data drainase jalan yang akan menjadi dasar masukan bagi perencanaan dan penganggaran dalam penanganan drainase jalan dengan lebih efisien dan efektif, diharapkan mampu mewujudkan meningkatnya pemanfaatan fungsi drainase jalan yang lebih proporsional dan baik.
- Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas
 - a. Updating beban aktual setiap golongan kendaraan akan meningkatkan keakuratan perencanaan desain perkerasan jalan menggunakan MDP.
 - b. Kajian distribusi kendaraan ODOL dapat memberikan gambaran berapa persen kendaraan yang melebihi beban sumbu standar beserta bebannya sehingga diperoleh VDF aktual pada suatu perkerasan jalan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan desain maupun preservasi jalan.
 - c. Pedoman desain geometrik simpang meliputi desain persimpangan sebidang dan tak sebidang dapat digunakan sebagai panduan perencana dalam mendesain persimpangan.
 - d. Rekomendasi teknis pada JPD eksisting disampaikan untuk menjadi bahan masukan dalam penyesuaian JPD eksisting untuk memenuhi pedoman terbaru sehingga dapat berfungsi dan berkeselamatan serta mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan.
 - e. Menyusun revisi Gambar Standar Bidang Jalan agar mudah dipahami oleh para perencana dan pelaksana jalan dan sesuai dengan peraturan terbaru.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Menyelaraskan Manual Desain Perkerasan dengan berbagai Pedoman dan Panduan di lingkungan Kementerian PUPR yang terkait dengan perencanaan perkerasan yang tersebar dalam beberapa penerbitan terpisah dengan memberikan perhatian lebih pada perbaikan tanah dasar dan drainase perkerasan serta menyesuaikan masukan parameter karakteristik material lokal.
 - b. Membantu Satker P2JN dan Konsultan Perencana dalam desain perkerasan jalan agar lebih mudah dan akurat, yaitu dengan menyediakan 1 (satu) Aplikasi Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) 2.0.

- c. Tersedianya *Test Track* sebagai program evaluasi kinerja jangka panjang perkerasan jalan akibat berbagai beban lalu lintas dan efek lingkungan terhadap kondisi perkerasan. Data *Test Track* dapat dijadikan data pendukung *Indonesia Road Management System* (IRMS), serta perbaikan pedoman, manual, dan spesifikasi di masa mendatang.

Kendala Kegiatan

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Banyaknya jumlah dokumen Pelengkap Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) dengan terbatasnya anggota tim dan narasumber
 - b. Adanya perubahan dan turunan peraturan serta kebijakan yang baru terbit di Tahun 2023.
 - c. Pembuatan aplikasi indrain memerlukan waktu untuk ujicoba dan validasi serta penyediaan *storage* untuk *system* penyimpanan data yang stabil.
 - d. Proses pendaftaran aplikasi Indrain untuk menggunakan server PDN memerlukan persyaratan administrasi khusus dan proses yang lama.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik lalu lintas
 - a. Dalam pelaksanaan kegiatan revisi gambar standar, terdapat beberapa permasalahan, yaitu perbedaan literatur antara Peraturan Menteri PUPR no 5 tahun 2023, Pedoman Desain Geometrik Jalan, dan literatur lainnya; banyaknya gambar yang harus disusun berdasarkan kombinasi yang ada di lapangan mengakibatkan potensi kesulitan untuk digunakan sebagai acuan;
 - b. Data sampling kurang untuk kendaraan berat tiap jenis kendaraan dan komoditasnya dalam survei beban kendaraan;
 - c. Hasil Reviu menunjukkan secara umum terdapat kesalahan pemilihan material *arrester bed* dan kurangnya pemeliharaan karena belum terdapat pedoman pemeliharaan JPD.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Reviu Dokumen Draft Final MDP oleh narasumber cukup lama;
 - b. Terdapat perbedaan kelas kendaraan untuk ditetapkan pada MDP 2023;
 - c. Perbedaan pendapat saat diskusi terkait dengan penentuan nilai Reliabilitas yang akan digunakan pada desain perkerasan jalan baru dan rehabilitasi perkerasan MDP 2023;

- d. Terdapat error mengenai *software Vehicle Damage Factor (VDF)* generator, untuk Input MDP.
- e. Penyelesaian *Basic Design Test Track* yang mundur dari target waktu, dikarenakan kurangnya SDM dan perubahan lokasi.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Mengoptimalkan anggota tim yang ada dengan melakukan diskusi intensif dan pengaturan kesediaan waktu dari narasumber
 - b. Melakukan penelusuran dan diskusi dengan instansi terkait.
 - c. Dilakukan uji coba secara menerus dan memperbaiki error pada aplikasi indrain secepatnya dan segera dilakukan ujicoba dan validasi di lapangan
 - d. Proses diserahkan ke Sub Dit DPSI Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan BPLJ mendampingi
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas
 - a. Gambar Standar: Menyepakati acuan utama pada peraturan Menteri PUPR no 5 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan sedangkan acuan lain sebagai tambahan, dan menyusun katalog gambar terlebih dahulu untuk mengetahui kombinasi yang akan di gambar
 - b. Kajian ODOL: melakukan penambahan data sampling pada rest area jalan tol terpilih dan pemanfaatan data WIM Bridge dari DPSI
 - c. Reviu JPD: perlunya sosialisasi kembali terkait JPD
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Mengundang diskusi narasumber *offline*.
 - b. Pembahasan kelas kendaraan yang dapat ditetapkan pada MDP 2023 mengundang pihak terkait.
 - c. Mengundang narasumber untuk memutuskan nilai reabilitas yang ditetapkan dalam MDP 2023.
 - d. Konfirmasi kepada pembuat software VDF generator, dan meminta software tersebut diperbaiki sampai bisa digunakan dengan baik
 - e. Segera mencari Konsultan untuk menyelesaikan *Basic Design Test Track*, dan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan data dukung terkait lokasi yang baru.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Pemberian beban pekerjaan yang lebih dan manajemen waktu yang kurang baik yang dapat menyebabkan mundurnya waktu penyelesaian draft pedoman
 - b. Kurangnya informasi data dan/atau peraturan terkini yang diperlukan sehingga peraturan yang digunakan masih menggunakan peraturan yang lama
 - c. Ujicoba dan validasi aplikasi indrain dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui dan memperbaiki sistem eror pada aplikasi.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif dengan pengelola server di Bina Marga.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas
 - a. Penyusunan katalog dengan kesepakatan acuan utama mempercepat pengerjaan dari reviu gambar standar
 - b. Dari hasil pengolahan data WIM Bridge berdasarkan data setiap jenis kendaraan dari hasil survei menghasilkan gambaran kondisi kendaraan ODOL dan persentasenya di Indonesia.
 - c. Melalui sosialisasi, telah terbentuk pemahaman baru mengenai JPD, namun kendala pemeliharaan belum dapat terselesaikan.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Perlunya mengoptimalkan waktu dan tenaga serta pemilihan skala prioritas untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai target output kegiatan Tahun 2023.
 - b. Kesepakatan dalam mengambil keputusan terkait perbedaan-perbedaan pendapat perlu untuk segera dilakukan.
 - c. Koordinasi yang baik antar *stakeholder* sangat berperan penting dalam penyelesaian target pekerjaan.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Perlunya Uji coba aplikasi InDrain di lapangan dengan banyak pengguna dan sekaligus sosialisasi di beberapa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - b. Melakukan Sosialisasi Pedoman Pembangunan Jalan dan Bangunan Mitigasi di Kawasan Hutan di Lingkungan Ditjen Bina Marga (BBPJJN / BPJJN);

- c. Menyusun Petunjuk praktis Pembangunan sistem drainase sementara pada tahap konstruksi kegiatan Pembangunan jalan mengingat pentingnya penanganan tersebut.
- Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas
Pedoman perencanaan jalur penghentian darurat diusulkan untuk mengatur proses operasional serta pemeliharaan JPD.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Perlunya melakukan sosialisasi terkait Manual Desain Perkerasan (MDP) terbaru ke seluruh Balai-Balai Pelaksana Jalan Nasional di seluruh Indonesia;
 - b. Perlunya melakukan validasi ataupun kalibrasi terhadap metode perancangan struktur perkerasan, dan diperlukan alternatif metode perancangan struktur perkerasan berbasis mekanistik yang lebih fundamental;
 - c. Perlunya menyediakan dan mengembangkan software SDPJ Versi web yang mengakomodir perubahan MDP 2023;
 - d. Perlu penyusunan *Detail Engineering Design (DED)* dari *Test Track* yang telah ada *basic* desainnya.

B. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

1. EBA 994- Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Kegiatan Operasional Perkantoran (PJ), Belanja Uang Lembur (PH), dan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana (PI) untuk melayani kebutuhan balai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi balai. Target Output Layanan Perkantoran pada Tahun 2023 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pencapaian kegiatan Layanan Perkantoran pada Tahun 2023 telah tercapai 1 (satu) layanan, karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan kelancaran pembayaran belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran sesuai dengan anggaran selama periode waktu satu tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Adapun Kegiatan Layanan Perkantoran terdiri dari (1) Kegiatan Belanja Uang Lembur Pegawai dan (2) Kegiatan Operasional Perkantoran yang meliputi:

1. Belanja Keperluan Perkantoran, meliputi belanja sehari-hari perkantoran seperti kebutuhan air minum mineral, jamuan rapat, hidangan tamu, dan lain-lain;
2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, meliputi pembayaran honorarium KPA, PPK, SPM, Bendahara, dan Pengelola Keuangan;

3. Belanja Barang Operasional Lainnya, meliputi pembayaran honorarium lembur PPNPN; dan
4. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, meliputi pengadaan belanja barang berupa Alat Tulis Kantor (ATK).

Sementara (3) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana yang dapat diakomodir diantaranya:

1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, telah diakomodir oleh penyedia jasa untuk dilakukan perbaikan;
2. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, meliputi Pemeliharaan wastafel, AC, dan shower pada Gd. Manajemen dan Gd. Layanan, pemasangan gantungan baju di toilet Gd. layanan dan Gd. Manajemen; dan
3. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, meliputi belanja pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan survei, dan lain-lain yang terdaftar dalam barang milik negara (BMN).

Manfaat Kegiatan:

- Kegiatan Belanja Uang Lembur Pegawai bermanfaat sebagai penunjang kinerja pegawai agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta mengapresiasi pegawai yang telah bekerja melebihi jam kerja pegawai dengan membayarkan uang lembur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Kegiatan Operasional Perkantoran bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam menunjang kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan; dan
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana bermanfaat untuk menjamin kelancaran fungsi dan operasional sarana prasarana perkantoran, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan membantu pencapaian kualitas output yang tinggi; serta menjamin mobilisasi pegawai terjamin aman, layak, dan nyaman.

Kendala Kegiatan:

Kegiatan Layanan Perkantoran yang berhubungan dengan keterbatasan limit kredit pemerintah ketika belanja barang, belanja uang lembur pegawai secara umum tidak mengalami kendala, hanya saja penyesuaian penghitungan jam kerja yang harus menyesuaikan titik koordinat dan foto absensi dengan Aplikasi Bravo yang harus sesuai

dengan titik koordinat di kantor. Apabila tidak sesuai, maka akan ada kebijakan khusus dalam perhitungan jam kerja pegawai.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Perkantoran meliputi:

- Keterbatasan limit kartu kredit pemerintah (KKP);
- Beberapa pegawai tidak melakukan absen dilokasi kantor sehingga waktu pelaksanaan lembur pegawai PPNP tidak akurat.

Sementara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana diantaranya:

- Pengecekan dan pemeliharaan rutin kerusakan tidak terdata secara rapi;
- Akhir tahun memasuki musim penghujan di beberapa titik mengalami kebocoran atap yang disebabkan oleh penyumbatan sampah pada saluran pembuangan air;
- Kerusakan lantai dan retakan tembok akibat perubahan cuaca dan penurunan tanah.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

- Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Operasional Perkantoran, diperlukan beberapa alternatif solusi, diantaranya:
 - Mengganti KKP dengan uang persediaan (GUP) dari bendahara;
 - Diberlakukan cek foto dan lokasi absen oleh admin untuk keakuratan data.
- Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, diperlukan beberapa alternatif solusi, diantaranya:
 - Pembuatan *google form* kerusakan gedung, sehingga semua pengguna/pegawai bisa langsung melaporkan kerusakan ringan;
 - Dilakukan pembersihan atap dan dak lantai bagian luar;
 - Sudah dilakukan penilaian dan analisa kerusakan gedung, sehingga ditahun berikutnya dapat dilakukan renovasi gedung bangunan kantor balai.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

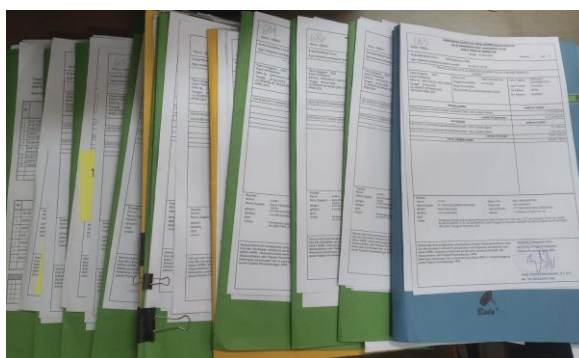
- Sebagian pegawai masih melakukan absensi diluar kantor.
- Perlunya kesadaran pegawai untuk lebih disiplin dalam hal waktu, dan mengajukan permintaan untuk memperkecil radius absen.
- Pelaporan kerusakan gedung cepat tertangani dengan mengisi *google form* https://bit.ly/Kerusakan_Gedung_BPLJ;
- Perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya perubahan rencana kegiatan pemeliharaan dan/atau perbaikan dengan realisasi, sehingga untuk pemeliharaan bangunan gedung kantor masih berlanjut di Tahun Anggaran 2024;

- Perbaikan Bangunan Gedung akibat perubahan cuaca yang menyebabkan keretakan pada tembok dan pergeseran lantai di Tahun Anggaran 2023 masih dilakukan renovasi Tahap I, sehingga renovasi selanjutnya di lakukan di Tahun Anggaran 2024.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

Berikut beberapa rekomendasi yang diburuhkan untuk perbaikan pada Kegiatan Layanan Perkantoran, diantaranya diperlukan:

- Optimalisasi proses administrasi yang tepat diantaranya diperlukan pemeriksaan ulang setiap pergantian skema pembayaran, atau pun perubahan berkas yang tidak dilanjutkan. Pemeriksaan tersebut minimal dilakukan disetiap awal bulan sebagai bagian dari evaluasi.
- Perencanaan yang lebih terperinci dari awal tahun, baik teknis maupun anggaran dengan diskusi, koordinasi dan kontrak kerjasama sedini mungkin walaupun kegiatan dilakukan jauh setelahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian rencana dari sisi teknis yang masih berpotensi terjadi.



Gambar 4.3 Pembayaran Belanja Uang Lembur Tahun 2023



Gambar 4.4 Belanja Sehari-hari Perkantoran Tahun 2023



Gambar 4.5 Pemeliharaan Gedung Balai dan Laboratorium Tahun 2023

2. EBB-951 Layanan Sarana Internal

Output Layanan Sarana Internal mencakup Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PG). Target Output Layanan Sarana Internal pada Tahun 2023 adalah 1 (satu) layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pencapaian output Layanan Sarana Internal Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 tercapai 1 (satu) layanan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena telah terpenuhinya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan. Kegiatan Layanan Sarana Internal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin; dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

Manfaat Kegiatan:

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran bermanfaat untuk menunjang tugas dan fungsi dari balai itu sendiri dengan menyediakan peralatan dan prasarana gedung yang diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kendala Kegiatan:

Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium yang berhubungan dengan proses pengadaan secara umum tidak mengalami kendala. Kebijakan terkait pembelanjaan anggaran yang memerlukan syarat nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi kendala untuk memenuhi beberapa peralatan yang diperlukan oleh Balai Perkerasan dan lingkungan Jalan

yang mengharuskan menggunakan alat impor (Non TKDN) karena selama ini beberapa barang terkendala dengan ketersediaan barang/produsen alat-alat lab kita yang unik.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

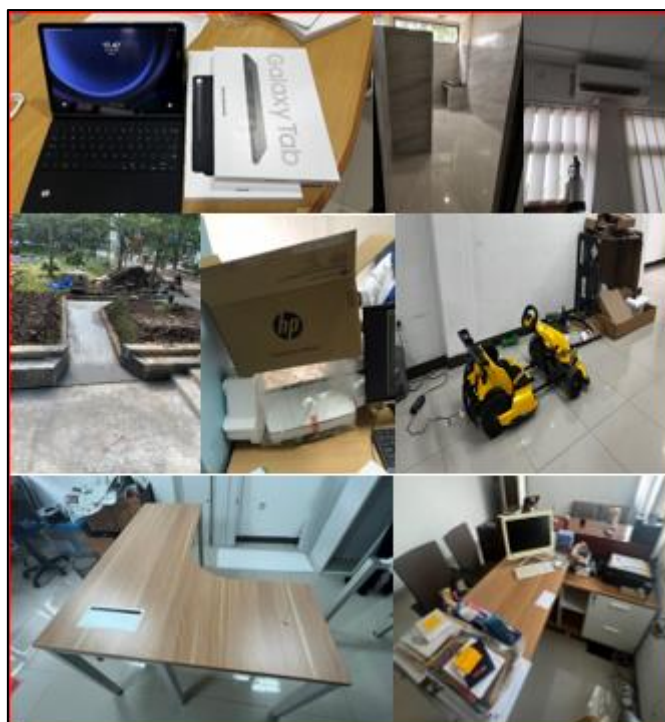
Berdasarkan kendala yang dihadapi, maka untuk tahun anggaran selanjutnya sebaiknya dicarikan pengganti barang yg diinginkan ke TKDN atau PDN, dengan mencari alat produksi lokal atau merupakan produk dalam negeri atau yang bisa memenuhi syarat dari nilai TKDN dengan fungsi sebanding. Untuk laptop/PC pada akhirnya membeli import atau TKDN sekitar 40% karena menyesuaikan dengan spesifikasi yang diminta oleh software yang digunakan contohnya BIM.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

Penyebab terkendalanya Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium adalah tender lelang pengadaan alat survei belum dapat dilakukan dikarenakan alat yang dibeli merupakan barang impor. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

Beberapa saran yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk proses pengadaan yang berkaitan dengan kebutuhan alat khusus yang memerlukan impor atau nilai dari TKDN yang belum memenuhi sementara alat tersebut menunjang tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, maka sebaiknya dilakukan pembuatan Justifikasi Teknis mengenai kebutuhan tersebut.



Gambar 4.6 Pengadaan Pendukung Perkantoran Tahun 2023

3. EBA 962- Layanan Umum

Output Layanan Umum mencakup Administrasi Kesatkeran (PK) dan Operasional Pimpinan (PL). Target Output Layanan Umum pada Tahun 2023 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi output layanan Umum adalah 1 Layanan, karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional pimpinan dan kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran sesuai dengan anggaran selama periode waktu 1 (satu) tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kegiatan Administrasi Kesatkeran dimaksudkan untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Paket ini terdiri dari 5 (lima) akun belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pembiayaan kebutuhan para petugas kesatkeran dalam rangka perjalanan dinas luar kota;
2. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota, pembiayaan kebutuhan petugas satker dalam rangka koordinasi dalam kota dengan KPPN setempat, perpajakan, dan perbankan;
3. Belanja Sewa, sewa peralatan operasional kantor;
4. Honor Output Kegiatan, berupa honorarium untuk pejabat pengadaan dan penanggung jawab e-monitoring;

5. Belanja Bahan, pembiayaan untuk kegiatan rapat dengan pihak yang terkait kesatkeran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan;

Kegiatan Operasional Pimpinan dimaksudkan untuk melayani kebutuhan operasional pimpinan dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Paket ini terdiri dari 2 (dua) akun belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pembiayaan kebutuhan pelaksanaan pimpinan dalam rangka perjalanan dinas luar kota.
2. Belanja Sewa, penyediaan kendaraan operasional pimpinan dan kantor sebanyak 2 unit kendaraan.

Manfaat Kegiatan:

- Kegiatan Administrasi Kesatkeran bermanfaat untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran untuk menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kegiatan Operasional Pimpinan bermanfaat untuk melayani kebutuhan operasional pimpinan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kendala Kegiatan:

- Kegiatan Administrasi Kesatkeran, adanya keterlambatan pada proses pengusulan honor output kegiatan untuk penanggung jawab petugas e-monitoring dan pejabat pengadaan
- Kegiatan Operasional Pimpinan, penyediaan sewa kendaraan operasional tidak dalam kurun waktu 1 tahun (hanya 11 bulan), sehingga penyerapan menjadi tidak maksimal

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

- Kegiatan Administrasi Kesatkeran, diperlukan pemeriksaan secara rutin kepada tim administrasi penyusunan setiap akhir bulan
- Untuk Kegiatan Operasional Pimpinan, usulan sewa kendaraan operasional diajukan pada awal tahun anggaran

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

- Penyebab terkendalanya Kegiatan Administrasi Kesatkeran adalah kesibukan dan keterbatasan tim administrasi yang berdampak terlambatnya proses pengajuan honor output kegiatan.
- Penyebab terkendalanya kegiatan Operasional Pimpinan adalah pencarian jenis kendaraan yang memenuhi syarat.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

- Dilakukan pemeriksaan secara rutin
- Pengusulan sewa kendaraan dilakukan jauh hari sehingga pada saat pelaksanaan kendaraan yang diperlukan sudah siap digunakan.



Gambar 4.7 Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan

4. EBA 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (PM). Target Output Layanan Perkantoran pada Tahun 2023 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi output Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal adalah 1 (satu)

Layanan, karena telah terpenuhinya layanan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan), Pembangunan Zona Integritas, dan Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

Manfaat Kegiatan:

Dengan adanya Kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal ini bermanfaat untuk menunjang salah satu tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

Lebih rinci, manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan aset BMN dan barang persediaan dengan baik dan tertib administrasi;
2. Terlaksananya perlindungan terhadap asset-asset BMN dari penyalahgunaan atau kerusakan dengan pemeliharaan yang baik;
3. Pengoptimalan kinerja dan efisiensi operasional dengan pemilihan dan penggunaan BMN yang tepat.
4. Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai BPLJ; serta terlaksananya kegiatan komunikasi publik dan kehumasan melalui media sosial tersampainya informasi kegiatan dan edukasi kepada masyarakat kaitannya tugas dan fungsi BPLJ;
5. Terlaksananya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPLJ;
6. Penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan mendukung penilaian maturitas SPIP Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kendala Kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

- Perubahan SK Kesatkeran, sehingga personil yang ditunjuk merupakan personil baru yang masih membutuhkan pelatihan baik dalam hal teori dan praktik mengenai pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan aset BMN dan barang persediaan.
 - Belum optimalnya *history* pencatatan aset BMN secara menyeluruh
 - Adanya beberapa aset BMN yang merupakan hasil pembelian dari instansi terdahulu sehingga memiliki nomor dan pencatatan yang berbeda dengan aset BMN hasil perolehan BPLJ saat ini.
2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)
- Untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai masih dilakukan secara *distance learning*, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) masih dirasakan kurang optimal untuk setiap pegawai. Sementara kendala terkait pelaksanaan komunikasi publik (kehumasan), diantaranya:
- a. Monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengelolaan media sosial sebagai masukan dan strategi perbaikan pada bulan-bulan selanjutnya belum terlaksana secara berkala.
 - b. Pendampingan dokumentasi kegiatan penting balai masih sering terlewat, karena kurangnya informasi dan keterbatasan waktu, serta kemampuan anggota tim komunikasi publik dan kehumasan yang tersedia.
 - c. Belum terdapat penunjukkan khusus tenaga ahli kehumasan, karena pekerjaan antara komunikasi publik dan kehumasan sebaiknya ditangani oleh petugas yang berbeda. Tenaga ahli kehumasan difokuskan untuk menangani permintaan data dan informasi.
3. Pembangunan Zona Integritas
- a. Kebutuhan SDM yang bersamaan dengan kegiatan proses bisnis balai; dan
 - b. Beberapa alur SOP internal balai memerlukan evaluasi dalam pelaksanaannya karena masih sering terjadi pegawai ada yang tidak memahaminya.
4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko
- Untuk penerapan SPIP, dalam mendukung penilaian maturitas, diharuskan untuk menyiapkan dokumen pendukung penerapan SPIP, namun pada realisasinya dokumen tersebut tidak semua tersedia, sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk menyiapkan dokumen tersebut. Sementara untuk penyusunan dokumen manajemen risiko masih dianggap sebagai pemenuhan formalitas dan belum dilakukan secara komprehensif.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - Diperlukan pelatihan, baik dalam hal teori maupun praktik terkait pelaksanaan administrasi keuangan, serta pengelolaan aset BMN dan barang persediaan;
 - Pendataan kembali seluruh Aset

Dilakukan pendataan kembali secara menyeluruh terhadap seluruh aset yang ada di BPLJ baik BMN hasil perolehan saat ini maupun perolehan dari instansi sebelumnya.

2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)
 - Monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengelolaan media sosial diterapkan secara berkala.
 - Pengaturan sedemikian rupa untuk pembagian tugas pendampingan dokumentasi kegiatan rutin dan terutama pendampingan dokumentasi kegiatan penting berdasarkan ketersediaan waktu dan kemampuan anggota tim komunikasi publik dan kehumasan.
3. Pembangunan Zona Integritas

Diperlukan penunjukan SDM untuk setiap pokja yang selaras dengan pekerjaan harian yang dilakukan. Melakukan prioritas evaluasi SOP internal balai; dan
4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko

Diperlukan kesiapan dan waktu lebih untuk pemenuhan dokumen pendukung penilaian maturitas SPIP dan penyusunan dokumen manajemen risiko balai secara komprehensif.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - Penyebab terkendalanya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan BMN adalah SK Kesatkeran yang berubah-ubah yang tidak diimbangi dengan pembekalan pelatihan, baik dalam hal teori maupun praktik sebelum penunjukan personil yang melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, serta personil yang mengelola aset BMN dan barang persediaan;
 - Pendataan kembali seluruh Aset

Penyebab terkendalanya pendataan aset ini tidak dipungkiri diakibatkan oleh SK Kesatkeran yang berubah-ubah dan kurangnya pendataan aset dari personal yang terdahulu. Sehingga, setiap adanya perubahan personil, data aset seringkali harus dikerjakan kembali dari awal karena belum adanya perpindahan dokumen secara menyeluruh.
2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)
 - Belum meratanya kemampuan individual tim komunikasi publik dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa pelatihan/ workshop untuk peningkatan kinerja anggota tim komunikasi publik terselenggara baik dari eksternal maupun internal, namun tim yang diikuti untuk mengikuti pelatihan/ workshop tersebut terbatas.
 - Kurangnya informasi dan keterbatasan waktu, serta kemampuan anggota tim komunikasi publik dan kehumasan dikarenakan banyaknya pekerjaan lain di luar kegiatan yang bersangkutan.

3. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas telah terlaksana dengan baik, namun pada triwulan ke-4 permasalahan jadwal pelaksanaan sering bertabrakan dengan kegiatan KBK Kembali muncul karena banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan proses bisnis balai yang harus diselesaikan.

4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko

Penyebab terkendalanya Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko adalah ketidaksiapan dan kurangnya waktu pemenuhan penilaian maturitas dan masih rendahnya *awareness* terhadap penyusunan manajemen risiko yang masih dianggap sebagai formalitas.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

Beberapa rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan tahun selanjutnya diantaranya:

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

- a. Perubahan SK Kesatkeran menjadi suatu tantangan tersendiri dalam pemenuhan kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset BMN dan barang persediaan. Pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan secara baik dan tepat waktu. Hal ini terbukti dengan diperolehnya Tanginas Award pada Triwulan III Tahun 2021 untuk kategori Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi Secara Tepat Waktu dan Akurat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik dan pelaporan yang dilakukan secara disiplin;
- b. Pelaksanaan pelatihan pemahaman administrasi keuangan dan pengelolaan aset BMN dan barang persediaan, beserta Aplikasi SAKTI dilakukan lebih awal (pada tahun anggaran), agar Petugas Keuangan dan BMN, serta persediaan dapat memahami lebih awal mengenai Aplikasi SAKTI;

2. Pendataan kembali seluruh Aset

- a. Perlu dibuatkan satu penyimpanan khusus terkait dokumen-dokumen BMN sehingga apabila terjadi perubahan personil, dokumen sudah tersedia didalam penyimpanan tersebut.
- b. Format pelaporan, pencatatan maupun jadwal pencatatan harus dibuat prototypenya, sehingga apabila kemudian hari dilakukan pencatatan, personil dapat mengisi format yang telah ditentukan sehingga tidak lagi diperlukan pencatatan ulang dari awal.
- c. Jadwal pelaporan harus ditetapkan dan disetujui oleh seluruh personil, agar pendataan aset ini dapat lebih terstruktur dan tertib.

3. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)

- a. Perlu dipertimbangkan untuk perpanjangan kontrak tenaga ahli komunikasi publik dan juga penunjukkan kehumasan dalam suatu surat keputusan untuk tahun

- berikutnya. Dengan tambahan penyediaan anggaran khusus bagi tenaga ahli komunikasi publik untuk setiap pendampingan dokumentasi kegiatan penting balai.
- b. Pembagian tugas khusus untuk anggota tim komunikasi publik dan/atau pelatihan khusus untuk seluruh entitas pegawai terkait fotografi dan videografi untuk memudahkan pengumpulan dokumentasi kegiatan balai agar semua pegawai dapat berpartisipasi dalam dokumentasi kegiatan, terutama untuk setiap pendampingan dokumentasi kegiatan penting balai.
 - c. Pengikutsertaan anggota komunikasi publik dan kehumasan dalam kegiatan pelatihan/ *workshop*, maupun *transfer of knowledge* antar anggota terkait komunikasi publik dan kehumasan yang diikuti dalam pelatihan/ *workshop*.
 - d. Pelaksanaan perencanaan konten media sosial dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial secara berkala.
 - e. Pengadaan perangkat fasilitas penunjang sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dan kehumasan.
4. Pembangunan Zona Integritas
Penyusunan kebutuhan Konsultan untuk membantu Pembangunan Zona Integritas.
 5. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko
 - a. Penyiapan semua bukti dukung penilaian maturitas SPIP yang sesuai format yang berlaku di Bina Marga; dan
 - b. Penyusunan secara komprehensif terkait manajemen risiko balai.



Gambar 4.8 Kegiatan Kepegawaian Tahun 2023

4.3 Perbandingan Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Dalam mengukur kinerja berbasis *outcome*, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun SK IKU, perbandingan capaian kinerja internal berbasis outcome berdasarkan SK IKU BPLJ dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perbandingan Capaian *Outcome* Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPLJ		SAT	2020			2021			2022			2023		
			Tar get	Reali sasi	Kine rja	Tar get	Reali sasi	Kine rja	Tar get	Reali sasi	Kine rja	Tar get	Reali sasi	Kine rja
Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan														
Param eter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	%	90	-	-	90	91,67	100	90	92,86	100	90	93,33	100
Param eter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	80	-	-	82	88,86	100	85	91,87	100	87	94,48	100

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, capaian outcome Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat melebihi target yang ditentukan dan setiap tahun selalu meningkat, ini membuktikan bahwa output yang dihasilkan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan banyak digunakan oleh internal maupun eksternal Kementerian PUPR

Tabel 4.7 Perbandingan Capaian *Output* Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

No	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023		
			Tar get	Reali sasi	Kin erja	Tar get	Reali sasi	Kin erja	Tar get	Reali sasi	Kin erja	Tar get	Reali sasi	Kin erja
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100	-	-	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	1	1	100	-	-	-	1	1	100
5	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	1	100

No	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023		
			Tar get	Reali sasi	Kin erja	Tar get	Reali sasi	Kin erja	Tar get	Reali sasi	Kin erja	Tar get	Reali sasi	Kin erja
7	Layanan Umum	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	1	100

Tabel 4.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

No	OUTPUT	SAT	Target Renstra 2020-2024	2020	2021	2022	2023			Capaian Kumulatif
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Renstra	Target PK	Realisasi	
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	5	1	1	1	1	1	1	100
2	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	-	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	1	1	1	1	1	100
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1	1	-	-	-	-	-
5	Layanan Sarana Internal	Unit	5	1	1	1	1	1	1	100
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	-	-	1	1	1	1	100
7	Layanan Umum	Layanan	-	-	-	1	1	1	1	100

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Meskipun merupakan Balai yang baru, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tiap tahunnya.

Pada Tahun Anggaran 2020 Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih bergabung dalam LKIP Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kondisi pandemi Covid-19 cukup berpengaruh pada pelaksanaan anggaran di tahun 2020 – 2021, sehingga kegiatan yang dilakukan belum optimal. Pada Tahun 2022, BPLJ sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemik Covid-19 sehingga kegiatan di lingkungan BPLJ dapat dioptimalkan. Disisi lain, terdapat kebijakan TKDN sehingga sebagian pengadaan barang di lingkungan BPLJ tidak dapat dilakukan yang mengakibatkan kinerja BPLJ menjadi kurang optimal. Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan balai, BPLJ menyusun tiga Kelompok Bidang Keahlian

sebagai struktur organisasi kelompok jabatan fungsional, sehingga kegiatan-kegiatan kajian kebijakan serta pelayanan teknis di bidang perkerasan dan lingkungan jalan lebih terkendali.

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja, dalam hal ini Output Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan dihilangkan menyesuaikan target perjanjian kinerja yang ada pada Renstra Bina Marga 2020 – 2024 dan penyesuaian kembali output pada indikator kinerja Dukungan Manajemen Kementerian. Tahun 2022, BPLJ berusaha untuk meningkatkan kinerjanya khususnya untuk kegiatan pelayanan teknis. Pada tahun 2022, BPLJ melakukan kegiatan-kegiatan sejumlah 4 kajian teknis, 10 penyusunan standar pedoman, serta menerima 216 layanan teknis yang terdiri atas setidaknya 40 kegiatan advis teknis, 18 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal, serta pendampingan teknis berupa rapat maupun sebagai narasumber untuk memberikan rekomendasi penanganan atas permasalahan yang ditinjau. Dalam hal ini, terjadi peningkatan kinerja di BPLJ dari yang sebelumnya kegiatan kajian pengembangan dan penerapan teknologi sejumlah 4 kegiatan pada tahun 2020 dan 12 kegiatan pada tahun 2021, serta peningkatan pada jumlah pelayanan teknis dari sebelumnya 123 kegiatan layanan teknis pada tahun 2021.

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilakukan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdapat peningkatan, dimana untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, untuk kegiatan layanan teknis BPLJ telah menerima 249 layanan yang terdiri atas 171 kegiatan advis teknis, 78 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal. Sedangkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi telah menghasilkan 3 kajian teknis, 2 aplikasi, 1 *basic design*, 23 pedoman terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.

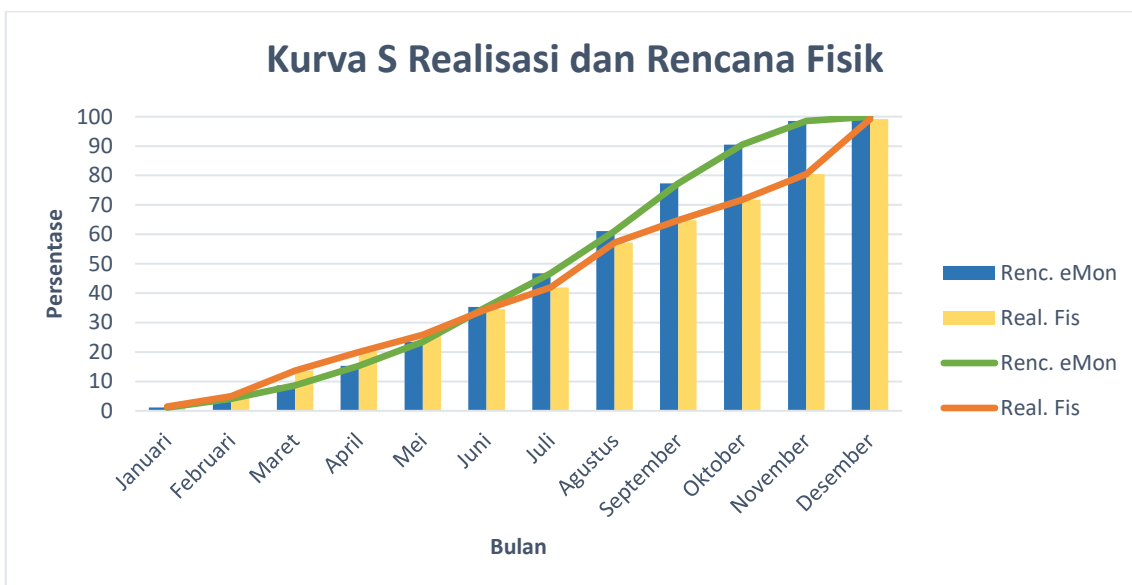
4.4 Realisasi Anggaran

Berdasarkan ie-monitoring PUPR, Pagu Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 11.755.966.000, dengan realisasi sebesar Rp 11.443.520.000 atau menyerap anggaran sebesar 97,34%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2023 sudah mencapai nilai 99,21%. Perbandingan realisasi anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.9, sedangkan kurva S capaian fisik dan keuangan dapat dilihat pada Gambar 4.9 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 202 dan Gambar 4.10.

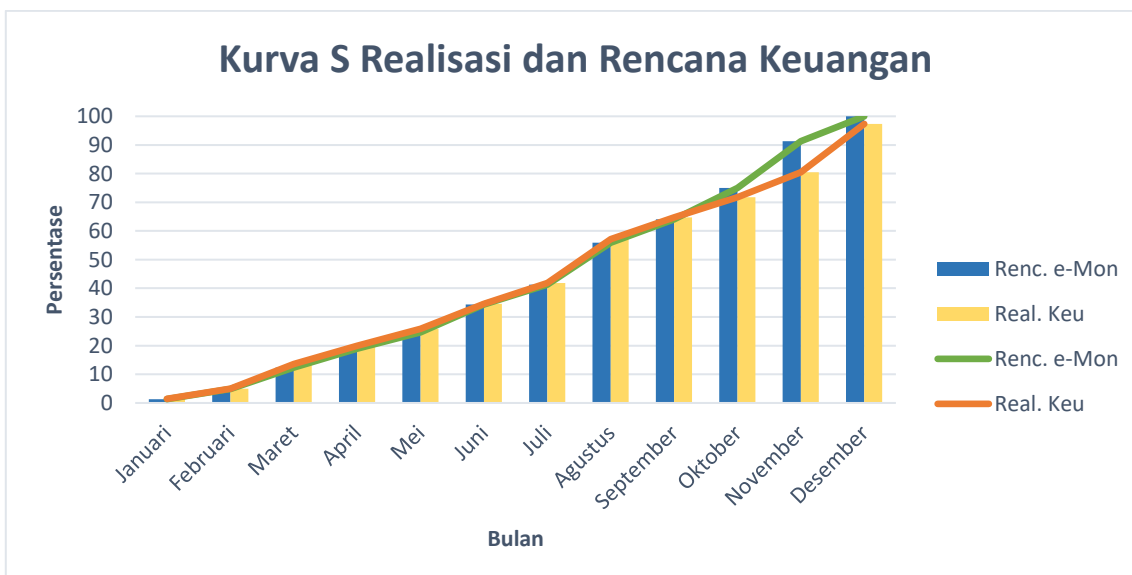
Tabel 4.9 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2023

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN		11.755.966	11.755.966	11.443.521	97.34	97.34	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional		7.383.263	7.383.263	7.155.006	96.91	96.91	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan							
84	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	7.383.263	7.383.263	7.155.006	96.91	96.91	
	Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	3.716.790	3.391.475	3.281.547	88.29	96.76	
	Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	3.666.473	3.991.788	3.873.459	105.65	97.04	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		4.372.703	4.372.703	4.288.515	98.07	98.07	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan							
88	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.669.833	1.701.214	1.646.877	98.63	96.81	
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.250.942	1.305.144	1.264.118	101.05	96.86	
	Penanganan dan Pencegahan COVID 19	92.475	92.475	84.651	91.54	91.54	
	Pembangunan Zona Intregitas	326.416	303.595	298.108	91.33	98.19	
89	EBA 962 Layanan Umum	556.801	525.420	510.852	91.75	97.23	
	Administrasi Kesatkeran	223.594	194.196	188.983	84.52	97.32	
	Operasional Pimpinan	333.207	331.224	321.869	96.60	97.18	
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	1.654.037	1.654.037	1.643.654	99.37	99.37	
	Gaji dan Tunjangan	61.000	61.000	60.953	99.92	99.92	
	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	744.757	746.557	744.516	99.97	99.73	
	Operasional Perkantoran	848.280	846.480	838.185	98.81	99.02	
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	492.032	492.032	487.132	99.00	99.00	

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	492.032	492.032	487.132	99.00	99.00	



Gambar 4.9 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2023



Gambar 4.10 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2023

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan merupakan balai yang terbentuk pada tahun 2020 akibat reorganisasi Balitbang yang sebelumnya merupakan bagian dari Pusjatan (saat ini

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan). Sampai saat ini Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tidak memiliki aset kendaraan operasional, bangunan dan tanah, serta alat-alat pengujian karena aset yang digunakan merupakan aset yang terdaftar dalam Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran karena dalam perjalanannya dibutuhkan pemeliharaan dan beberapa renovasi terkait bangunan atau gedung yang ditempati serta pemeliharaan alat pengujian maupun kendaraan operasional yang digunakan, menggunakan anggaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Selain itu untuk menunjang kinerja pegawai masih diperlukan pengadaan unit komputer, alat laboratorium, alat kantor dll.

Selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan enam kali perubahan anggaran. Penggunaan anggaran BPLJ dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan pimpinan. Kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga terdapat beberapa kegiatan tertunda karena perbaikan harus mendatangkan barang dari luar negeri yang tidak memiliki TKDN. Pada akhir tahun Balai perkerasan dan lingkungan Jalan mendapatkan tugas direktif untuk pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi pembangunan Sirkuit di lingkungan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagai bentuk dukungan dicanangkannya gerakan penggunaan kendaraan listrik (*Electric Vehicle*). Selain ditanggungkannya perbaikan alat dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, Balai perkerasan dan lingkungan Jalan mencoba perbaikan alat dengan mengoptimalkan tenaga lokal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didampingi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 68 orang pada tahun 2023 dengan rincian 43 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 Orang PPPK, 15 orang Non Pegawai Negeri Sipil, dan 7 orang Konsultan Individu. Jumlah SDM ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 66 orang pegawai pada tahun 2022. Penambahan pegawai ini diakibatkan oleh adanya formasi optimalisasi PPPK, selain ada beberapa pegawai juga mutasi ke unit kerja lain tetapi secara jumlah Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mengalami penambahan SDM.

Sebagai perbandingan pagu dan realiasi anggaran terkait outcome dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Satker BPLJ

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	PAGU	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020*	56	-	-	100%
2021	67	9.460.457.000	9.391.455.000	100%

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	PAGU	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2022	66	11.179.184.000	10.849.205.000	99,63%
2023	68	11.755.966.000	11.443.520.000	97.34%

4.5 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja merupakan salah satu komponen baru dalam penilaian laporan kinerja 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan mengenai pengaturan terbaru terhadap pembobotan penilaian pelaporan kinerja. Adapun kriteria-kriteria dalam komponen baru meliputi apakah informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan dalam mempengaruhi budaya kerja.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah melakukan penyampaian dan pengisian kuesioner kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja di lingkungannya serta jajarannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bukti dukung pemanfaatan laporan kinerja sebagaimana disampaikan sebelumnya.

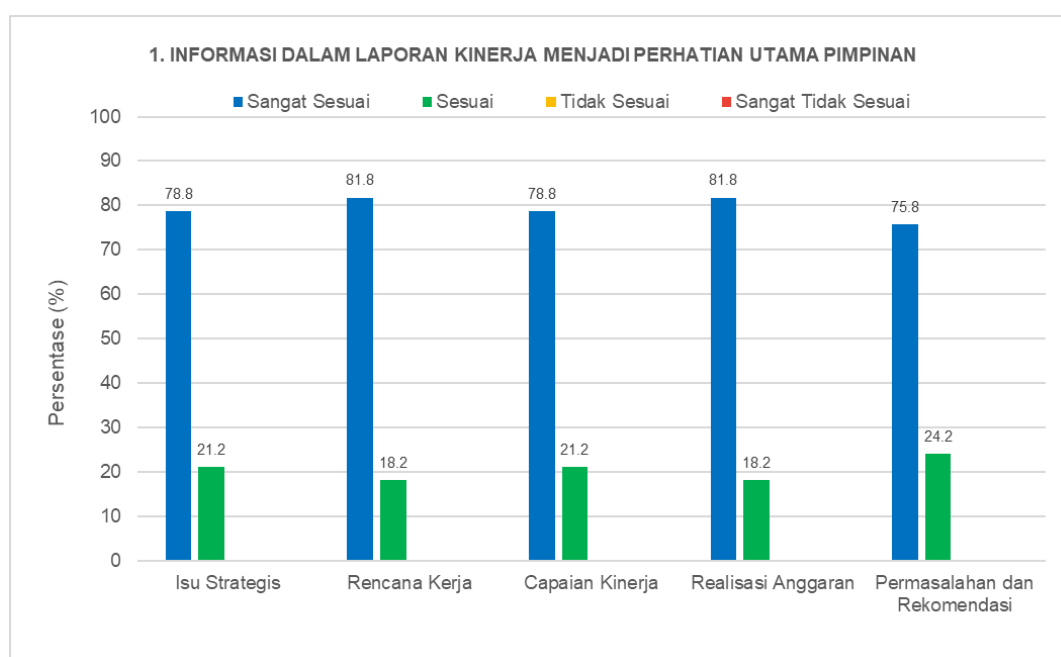
Pada kuesioner yang disampaikan, secara garis besar terdapat 7 (tujuh) poin utama, sesuai dengan kriteria dari PANRB, yang ditanyakan kepada responden. Kemudian responden diberikan 4 (empat) pilihan jawaban terhadap kebermanfaatan laporan kinerja mulai dari sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan kinerja telah memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi untuk penyusunan pemrograman kegiatan unit kerja/balai tahun berikutnya.

Adapun hasil dari kuesioner tersebut khususnya di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, untuk setiap kriterianya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Kriteria 1, informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan, yang mencakup hal berikut:
 - a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
 - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.

- c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
- d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
- e. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.

Hasil kuesioner (**Gambar 4.11**) menunjukkan rata-rata 79,40% responden menyatakan sangat sesuai dan 20,60% responden menyatakan sesuai.

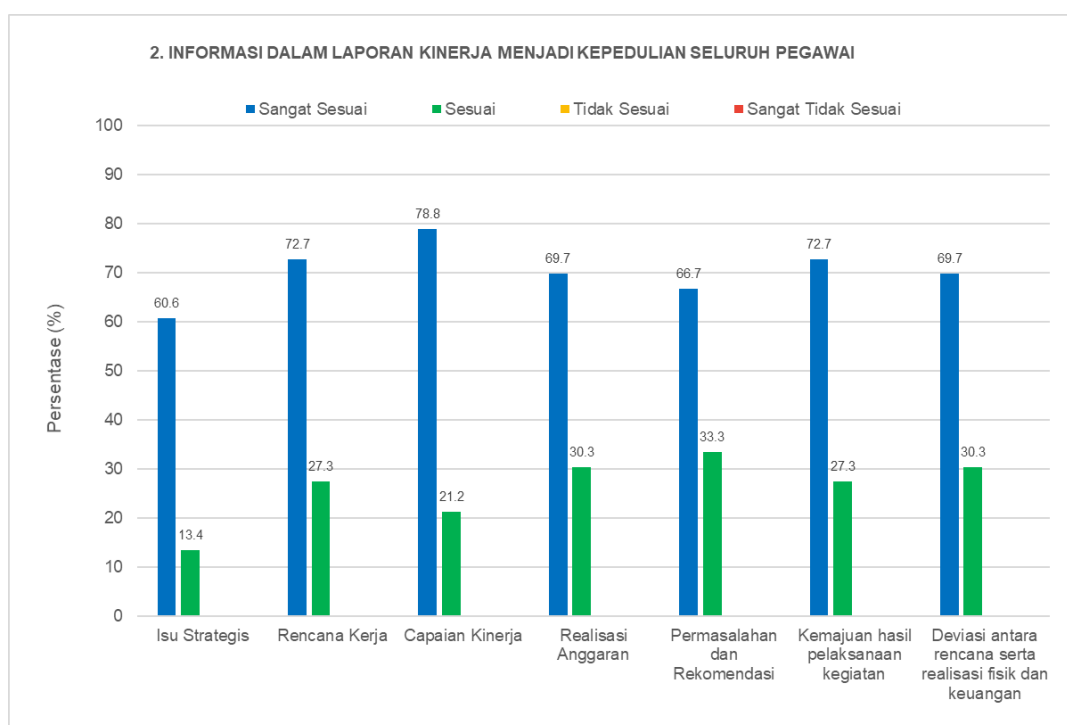


Gambar 4.11 Hasil Kuesioner Kriteria 1

- 2. Kriteria 2, informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, yang mencakup hal berikut:
 - a. Saya mengetahui informasi isu strategis unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2023.
 - b. Saya mengetahui informasi rencana kerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2023.
 - c. Saya mengetahui informasi capaian kinerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2023.
 - d. Saya mengetahui informasi realisasi anggaran unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2023.
 - e. Saya mengetahui informasi permasalahan dan rekomendasi unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2023.

- f. Saya mengetahui informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja tahun 2023.
- g. Saya mengetahui informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja tahun 2023.

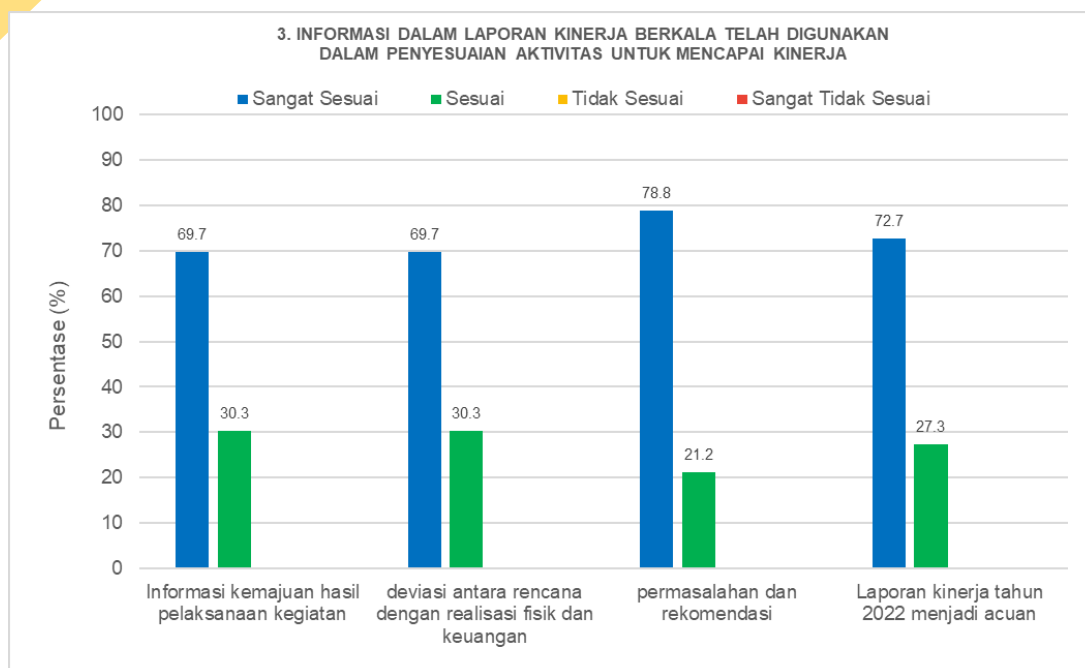
Hasil kuesioner (**Gambar 4.12**) menunjukkan rata-rata 70,13% responden menyatakan sangat sesuai dan 26,16% responden menyatakan sesuai.



Gambar 4.12 Hasil Kuesioner Kriteria 2

- 3. Kriteria 3, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, yang mencakup hal berikut:
 - a. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - b. Informasi deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - c. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - d. Laporan kinerja tahun 2022 menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja tahun 2023.

Hasil kuesioner (**Gambar 4.13**) menunjukkan rata-rata 72,73% responden menyatakan sangat sesuai dan 27,28% responden menyatakan sesuai.

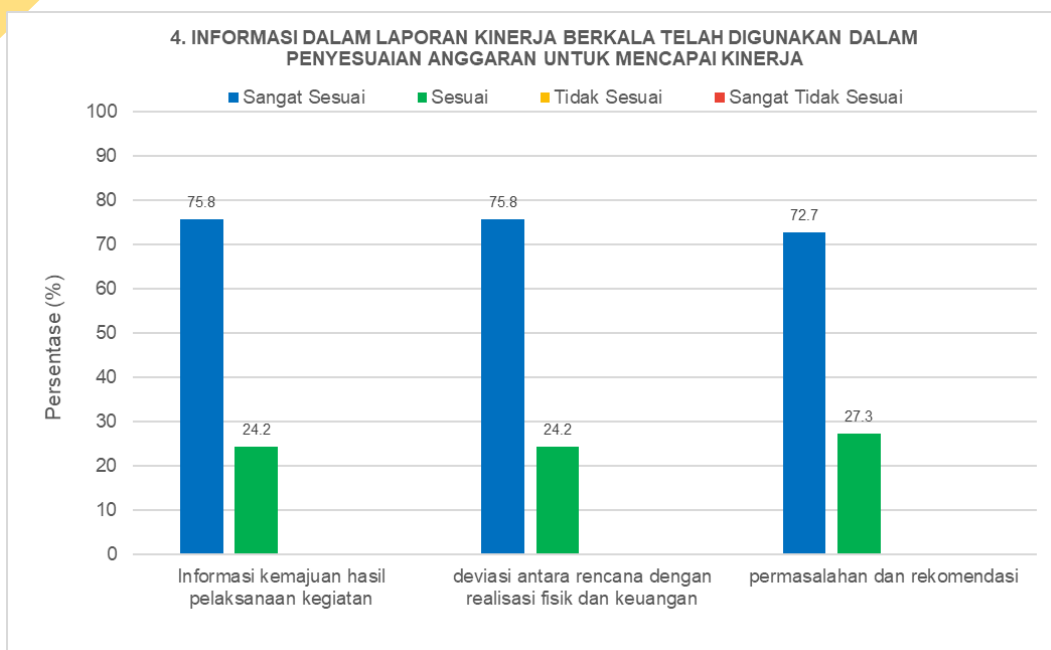


Gambar 4.13 Hasil Kuesioner Kriteria 3

4. Kriteria 4, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, mencakup hal berikut:

- a. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
- b. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
- c. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.

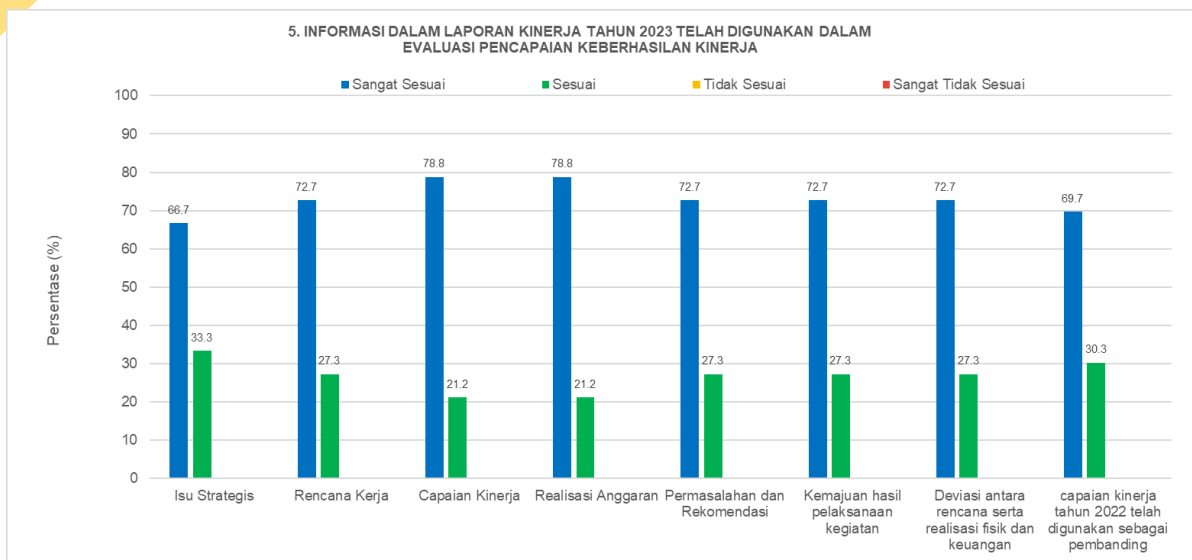
Hasil kuesioner (**Gambar 4.14**) menunjukkan rata-rata 74,77% responden menyatakan sangat sesuai dan 25,23% responden menyatakan sesuai.



Gambar 4.14 Hasil Kuesioner Kriteria 4

5. Kriteria 5, informasi dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, mencakup hal berikut:
- a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - e. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - f. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - g. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - h. Informasi capaian kinerja tahun 2022 telah digunakan sebagai pembanding dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

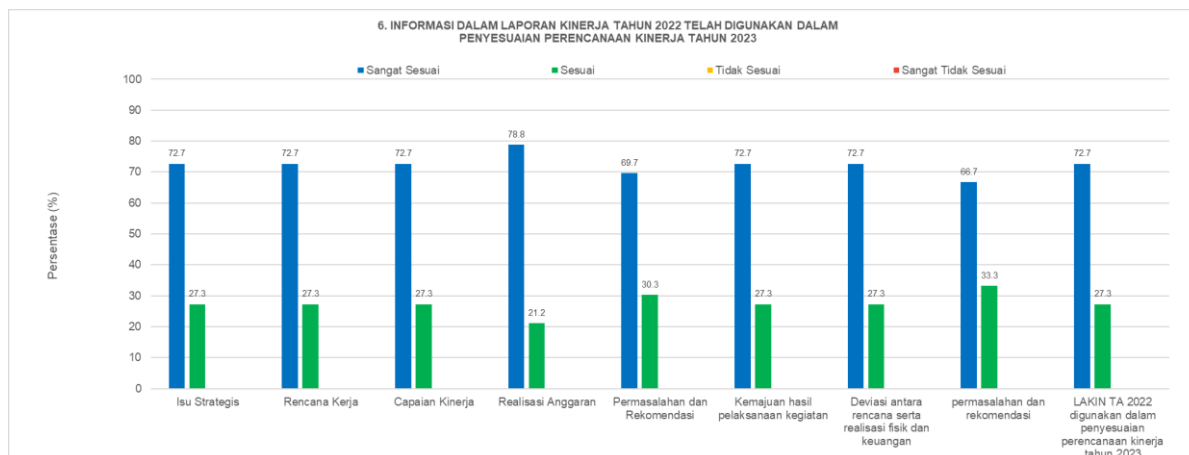
Hasil kuesioner (**Gambar 4.15**) menunjukkan rata-rata 73,10% responden menyatakan sangat sesuai dan 26,90% responden menyatakan sesuai.



Gambar 4.15 Hasil Kuesioner Kriteria 5

6. Kriteria 6, informasi dalam laporan kinerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023, yang mencakup hal berikut:
- a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - e. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - f. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - g. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - h. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
 - i. Laporan kinerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.

Hasil kuesioner (**Gambar 4.16**) menunjukkan rata-rata 72.38% responden menyatakan sangat sesuai dan 27.62% responden menyatakan sesuai.

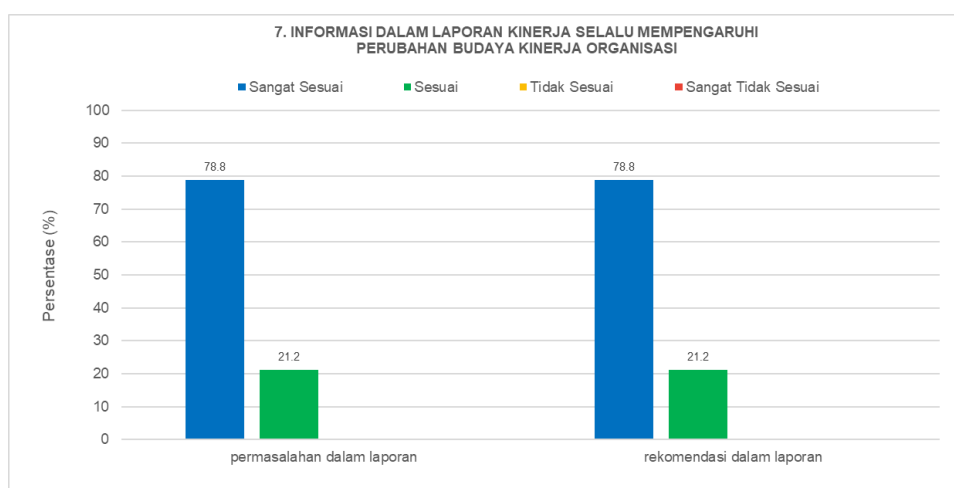


Gambar 4.16 Hasil Kuesioner Kriteria 6

7. Kriteria 7, informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, yang mencakup hal berikut:

- a. Informasi permasalahan dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi.
- b. Informasi rekomendasi dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi.

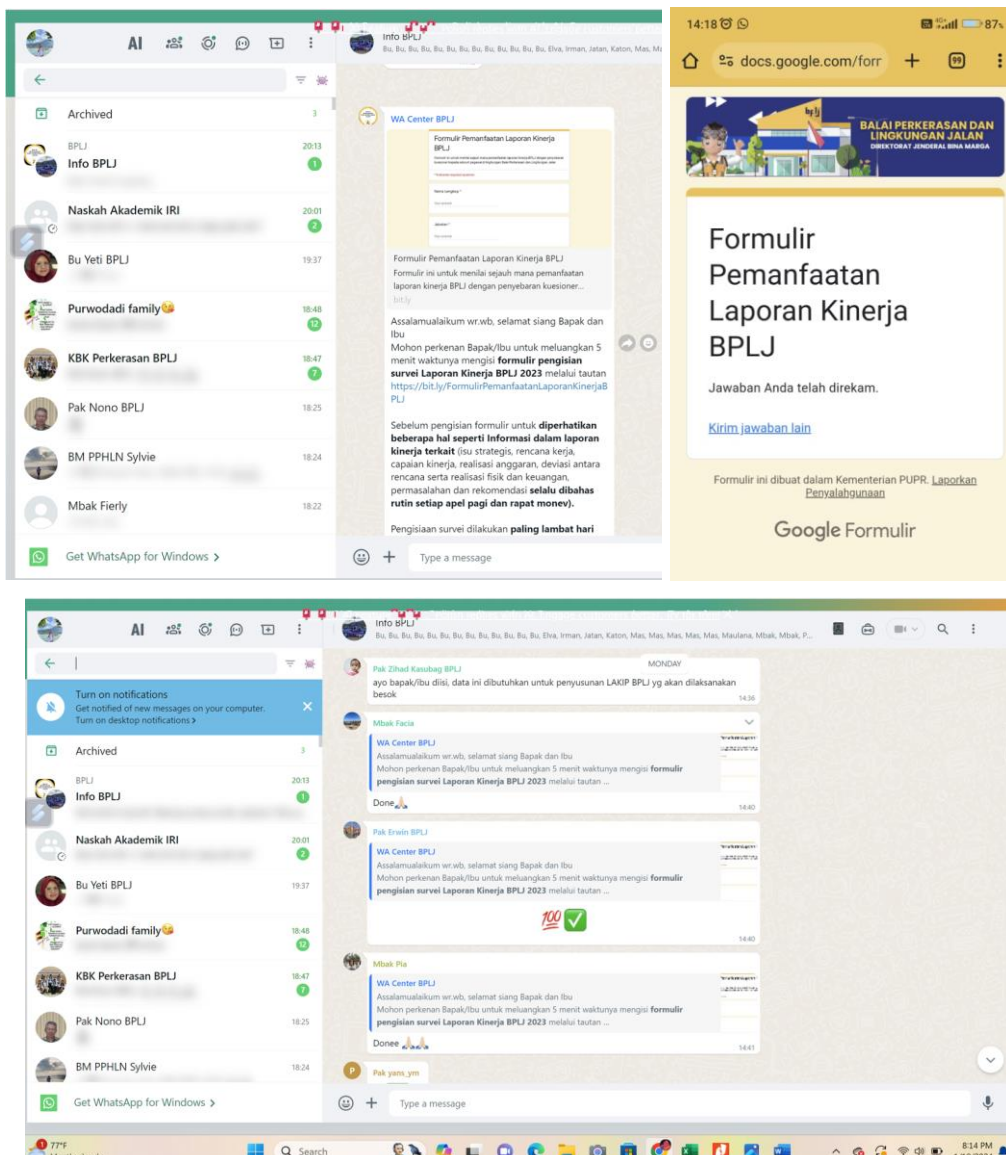
Hasil kuesioner (**Gambar 4.17**) menunjukkan rata-rata 78,80% responden menyatakan sangat sesuai dan 21,20% responden menyatakan sesuai.



Gambar 4.17 Hasil Kuesioner Kriteria 7

Hasil kuesioner Pemanfaatan laporan kinerja di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan memiliki persentase rata-rata nilai sangat sesuai yaitu 74,47%, dan sesuai 25,52%. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan memiliki

bermanfaat sangat baik. Berikut disampaikan bukti pengisian kuesioner di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Dokumentasi penyebaran Kuesioner

4.6 Paket Diresmikan dan Penghargaan

Pada tanggal 16 Desember 2023, telah diresmikan Sirkuit EV PUPR- Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Bandung oleh Bapak Hedy Rahadian selaku Direktur Jenderal Bina Marga. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan salah satu balai yang menerapkan teknologi perlengkapan jalan. Selain itu juga Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah mendapatkan penghargaan sebagai 5 terbaik pengelolaan media sosial pada tingkat Kementerian PUPR Adapun dokumentasi peresmian dan penghargaan dapat dilihat pada lampiran.

4.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Layanan Publik

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini pada prinsipnya mengacu pada Permen PANRB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei yaitu untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayan publik. Kuesioner yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) unsur pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan indeks dengan persepsi pelayananan, maka dapat dilihat dari tabel sebagaimana tersebut di bawah:

Tabel 4.11 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,60	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,0	A	Sangat baik

Sumber: Permen PAN dan RB No 14 tahun 2017

Pada Tahun 2023 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. dengan responden yang berasal dari Internal maupun Eksternal Kementerian PUPR. Pelaksanaan SKM ini dilakukan setiap triwulan. Dari hasil survei, berikut disampaikan data hasil kuesioner yang telah dihimpun oleh BPLJ selama tahun 2023.

Tabel 4.12 Indeks Kepuasan Masyarakat BPLJ 2023

Unsur	Unsur Layanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-Rata
U1	Persyaratan Pelayanan	95,59	96,25	94,53	97,73	96,03
U2	Prosedur Pelayanan	92,65	93,75	96,09	94,32	94,20
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	94,12	91,25	89,06	93,18	91,90
U4	Biaya / Tarif	91,18	88,75	94,53	93,18	91,91
U5	Mutu Hasil Pengujian	95,59	95,00	95,31	96,59	95,62
U6	Kompetensi pelaksana	97,06	93,75	96,88	95,45	95,79
U7	Perilaku Pelaksana	98,53	93,75	99,22	96,59	97,02
U8	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	92,65	92,50	93,75	95,45	93,59
U9	Sarana dan Prasarana	95,59	93,75	94,53	96,59	95,12
SKM BPLJ		94,68	93,10	94,78	95,36	94,48

Dari hasil survei kepuasan masyarakat Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2023 mendapatkan nilai 94.48 dengan predikat Sangat Baik (A).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja balai dalam penggunaan anggaran. Laporan ini terdiri dari 5 Bab yang berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis. Perencanaan Kinerja yang menguraikan renstra Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang mencangkup visi dan misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Perjanjian kinerja (PK) yang memuat target kinerja dengan membandingkan PK Awal dan PK Revisi serta metode pengukurannya. Kapasitas organisasi berisi profil sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan sebagai perangkat untuk mencapai capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja mencakup realisasi anggaran dan fisik, perbandingan kinerja organisasi, pemanfaatan laporan kinerja, paket diresmikan dan penghargaan, dan survei kepuasan masyarakat sebagai parameter sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan dalam melayani masyarakat.

5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan berdasarkan faktor internal meliputi:

1. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terus menerus meningkatkan komitmen dan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya. Penerapan SAKIP yang baik akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada jajaran aparat Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga guna mewujudkan *Good Governance*.
2. Peran serta pimpinan pada setiap kegiatan dalam mengarahkan dan membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, serta kerjasama dari seluruh pegawai yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang lebih baik.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari setiap paket kegiatan dilakukan secara rutin.

Selain faktor internal yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga didukung oleh faktor eksternal yaitu setiap pelanggan maupun mitra kerja dapat berkolaborasi dan memberikan masukan serta saran yang membangun guna mewujudkan kinerja layanan yang lebih baik.

5.3 Permasalahan

Capaian kinerja kegiatan di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2023 mencapai 99.21% dengan penyerapan anggaran sebesar 97.34%. Secara keseluruhan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah berhasil memenuhi target pada Perjanjian Kinerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan dan kendala utama yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan awal dalam Dokumen RKA dan target perjanjian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan belum cukup matang serta terdapat permintaan-permintaan yang bersifat direktif, sehingga pada saat pelaksanaannya perlu beberapa kali perubahan anggaran (revisi DIPA).
- b. Terdapat perubahan lokasi pembangunan jalan *test track* yang mengakibatkan berubahnya data-data yang diperlukan untuk menyusun *Detailed Engineering Design* (DED), sehingga pada tahun ini, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan hanya dapat mengeluarkan output sampai tahap *basic design test track*.
- c. Terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat direktif dari atasan, disposisi pimpinan, dan undangan pembahasan daring terutama terkait layanan teknis yang mengakibatkan beban pekerjaan berlebih yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan baik dalam melakukan kegiatan maupun penyerapan anggaran yang telah diprogramkan sebelumnya.
- d. Pendistribusian pekerjaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih belum merata dikarenakan ketimpangan kuantitas dan keterbatasan kualifikasi baik dalam bidang keteknisan maupun bidang administratif kesatkeran.
- e. Kesulitan dalam pengadaan alat baru akibat kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang dihadapi tahun ini tidak terulang pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Perlu dipastikan

Kembali Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Rencana Strategis, sehingga meminimalisir perubahan anggaran (revisi DIPA).

- b. Pada saat perencanaan disain pembangunan jalan, sebaiknya dilakukan telaahan lokasi yang sesuai agar dilakukan agar saat pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
- c. Melakukan pemilihan kegiatan berdasarkan prioritas dan arahan pimpinan
- d. Diperlukan peningkatan kompetensi SDM dengan seperti kegiatan *in house training*; pendidikan dan pelatihan; vokasi maupun pemerataan kualifikasi SDM teknis dan perlu diprogramkan penambahan SDM seperti penggunaan tenaga bantuan pihak luar yang berkompeten pada bidang terkait di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- e. Mengefektifkan pembentukkan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang merupakan penugasan direktif pimpinan, sehingga pembahasan terkait permasalahan teknis lapangan dilakukan oleh tim/personil yang benar-benar kompeten.
- f. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi peningkatan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga di tahun yang akan datang. Satuan Kerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan diharapkan dapat menyusun rencana kinerja yang lebih baik dan dapat mengantisipasi permasalahan potensial yang mungkin terjadi.

Akhir kata, Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2023 ini diharapkan menjadi laporan kinerja yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik di dalam lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan maupun di luar lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, serta dapat menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja ke depan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2023;
2. Pengukuran Kinerja (Data Catatan Kaki Laporan Kinerja);
3. Penghargaan;
4. BA Kesepakatan Capaian Kinerja; dan
5. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan.

PK AWAL 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berdatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Bandung, 06 Januari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100 %	100,00 %
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advisi teknik	100,00 %	100,00 %
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen
	Rincian Output		
ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100,00 %
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00 %	100,00 %
	Rincian Output		
	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA 962 Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA 964 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan
EBB 961 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Total Anggaran

Anggaran
Rp 7.083.263.000
Rp 4.372.703.000
Rp 11.455.966.000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rating Keselamatan Jalan Nasional					11.455.866	Total Anggaran
		ABF Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			7.083.263	
				102 Kajian Kebijakan			7.083.263	
			1 Dokumen		Kajian Rekomendasi PA Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.652.044	
				404	Aktivitas dan Layanan Teknis		3.431.219	
			1 Layanan		Layanan Teknis Bidang PE Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.431.219	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian					4.372.703	
		EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan			1.542.284	
				058	Pelayanan Umum dan Pengembangan		1.542.284	
			1 Laporan		Pelayanan Umum, Pelayanan PM Rumah Tangga dan Pengembangan	Bandung	1.012.927	
			1 Laporan		PN Peningkatan dan Penggabungan COVID 19	Bandung	217.200	
			1 Laporan		PO Pembebasan Zona Integritas	Bandung	312.157	
		EBA 962 Layanan Umum	1,00	Layanan			884.350	
				054	Pengelolaan Keuangan		684.350	
			1 Laporan		PK Administrasi Keselamatan	Bandung	281.641	
			1 Laporan		PL Operasional Pemeliharaan	Bandung	392.709	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan			1.854.037	
				001	Gaji dan Tunjangan		61.000	
			1 Tahun		PH Gaji dan Tunjangan	Bandung	61.000	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.593.037	
			1 Tahun		Pemeliharaan Gedung PI Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	846.577	
			1 Tahun		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	746.460	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit			492.032	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		492.032	
			1 Paket		PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	492.032	

PK REVISI 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 05 Desember 2023

PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN

PIHAK PERTAMA




NENI KUSNIANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022		Target 2023	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional				
	IKK : Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	100.00	%
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100.00	%	100.00	%
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1.00		1.00	
	Rincian Output				
ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100	%	100.00	%
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100.00	%	100.00	%
	Rincian Output				
	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	1.00	Layanan
	EBA 962 Layanan Umum	1.00	Layanan	1.00	Layanan
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.00	Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal	1.00	Unit	1.00	Unit	

Kegiatan :

- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran

Anggaran

Rp 7.383.263.000



Rp 4.372.703.000

Rp 11.755.966.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Bandung, 05 Desember 2023
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Neni Kusnianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							11.755.966	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						7.383.263	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional					7.383.263	
		ABF Layanan Keteleknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan			7.383.263	
				102	Kajian Kebijakan		3.716.790	
			1	Dokumen	Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.716.790	
				404	Advis dan Layanan Teknis		3.666.473	
			1	Layanan	Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.666.473	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						4.372.703	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					4.372.703	
		EBA Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan			1.669.833	
				058	Pelayanan Umum dan Perengkapan		1.669.833	
			1	Laporan	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perengkapan	Bandung	1.250.942	
			1	Laporan	PN Penanganan dan Pencegahan COVID 19	Bandung	92.475	
			1	Laporan	PO Pembangunan Zona Intregitas	Bandung	326.416	
		EBA Layanan Umum	1.00	Layanan			556.801	
				054	Pengelolaan Keuangan		556.801	
			1	Laporan	PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	223.594	
			1	Laporan	PL Operasional Pimpinan	Bandung	333.207	
		EBA Layanan Perkantoran	1.00	Layanan			1.654.037	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				001	Gaji dan Tunjangan		61.000	
			1	Tahun	PH Gaji dan Tunjangan	Bandung	61.000	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.593.037	
			1	Tahun	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	744.757	
			1	Tahun	PJ Operasional Perkantoran	Bandung	848.280	
		EBB Layanan Sarana Internal	1.00	Unit			492.032	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		492.032	
			1	Paket	PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	492.032	

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	REALISASI	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD REVISI/EMON (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(8)*100	(7)=(6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(17)
											11.755.966	11.755.966	11.443.521	97.34	97.34	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional										7.383.263	7.383.263	7.155.006	96.91	96.91	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional									7.383.263	7.383.263	7.155.006	96.91	96.91	
		ABF Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan 001	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	100.00	99.39		7.383.263	7.383.263	7.155.006	96.91	96.91	
								102	Kajian Kebijakan		3.716.790	3.391.475	3.281.547	88.29	96.76	
			1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	100.00		PA Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.716.790	3.391.475	3.281.547	88.29	96.76	
								404	Advis dan Layanan Teknis		3.666.473	3.991.788	3.873.459	105.65	97.04	
			1 Layanan	1 Layanan	1	100	98.88		PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.666.473	3.991.788	3.873.459	105.65	97.04	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										4.372.703	4.372.703	4.288.515	98.07	98.07	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									4.372.703	4.372.703	4.288.515	98.07	98.07	
		EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	1.00	Layanan	1.00	100.00	98.53		1.669.833	1.701.214	1.646.877	98.63	96.81	
								058	Pelayanan Umum dan Perencanaan		1.669.833	1.701.214	1.646.877	98.63	96.81	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	98.5		PM Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perencanaan	Bandung	1.250.942	1.305.144	1.264.118	101.05	96.86	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	100		PN Penanganan dan Pencegahan COVID 19	Bandung	92.475	92.475	84.651	91.54	91.54	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	98.19		PO Pembangunan Zona Intregitas	Bandung	326.416	303.595	298.108	91.33	98.19	
		EBA 962 Layanan Umum	1.00	Layanan	1.00	Layanan	1.00	100.00	98.12		556.801	525.420	510.852	91.75	97.23	
								054	Pengelolaan Keuangan		556.801	525.420	510.852	91.75	97.23	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	97.32		PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	223.594	194.196	188.983	84.52	97.32	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	98.59		PL Operasional Pimpinan	Bandung	333.207	331.224	321.869	96.60	97.18	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.00	Layanan	1.00	100.00	99.50		1.654.037	1.654.037	1.643.654	99.37	99.37	
								001	Gaji dan Tunjangan		61.000	61.000	60.953	99.92	99.92	
			1 Tahun	1 Tahun	1	100	100		PH Gaji dan Tunjangan	Bandung	61.000	61.000	60.953	99.92	99.92	
								002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.593.037	1.593.037	1.582.701	99.35	99.35	
			1 Tahun	1 Tahun	1	100	100		PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	744.757	746.557	744.516	99.97	99.73	
			1 Tahun	1 Tahun	1.00	100	99.02		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	848.280	846.480	838.185	98.81	99.02	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	1.00	Unit	1.00	Unit	1.00	100	99.00		492.032	492.032	487.132	99.00	99.00	
								053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		492.032	492.032	487.132	99.00	99.00	
			1 Paket	1 Paket	1	100	99		PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	492.032	492.032	487.132	99.00	99.00	

PENGHARGAAN



Gambar - Peresmian Jalan Sirkuit EV PUPR

Kualitas Konten | TIER 3

Rekap **ketercapaian untuk kategori kualitas konten** pada Tier 3 secara keseluruhan

<p> 10 Balai dengan performa Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Balai Bahan Jalan ➔ BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat ➔ Balai P2P Jawa I ➔ Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung ➔ Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan ➔ BBPJN Jateng-DIY ➔ BBWS Serayu Opak ➔ BBPJN Jatim-Bali ➔ Balai P2P Sumatera II ➔ BPPW Papua 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimasi Channel Media Sosial ✓ Komposisi konten yang variatif ✓ Optimasi konten video dan infografis ✓ Penyampaian konten rilis yang informatif ✓ Frekuensi konten yang baik ✓ Penaemasan konten yang tap in trend dan related dengan audience
--	--

Gambar – Kategori 5 Besar Konten Terbaik PUPR

BA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

BERTA ACARA REKAPITULASI FISIK DAN ANGGARAN LAPORAN KINERJA UNIT KERJA BALAI TA.2023
DI LINGKUNGAN DIT.JEN. BINA MARGA

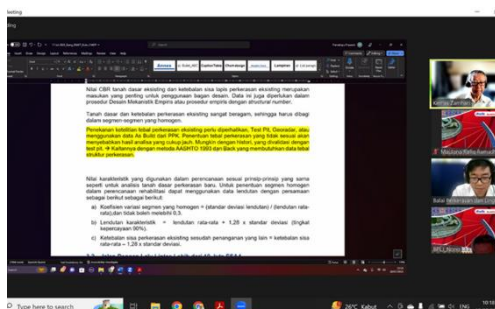
No	Sasaran Program/IKY/IKK	Satuan	BPLJ						
			Fisik			Anggaran (dalam Ribuan Rp.)			
			PK Revisi Desember TA. 2023	Revisi Akhir TA. 2023	Realisasi	PK Awal TA. 2023	PK Revisi Desember TA. 2023	Revisi Akhir TA. 2023	Realisasi
TOTAL ANGGARAN		Km				11,455,066.00	11,755,066.00	11,755,066.00	11,443,521.00
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional		Km				7,083,263.00	7,383,263.00	7,383,263.00	7,155,006.00
IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		Km				0.00	0.00	0.00	0.00
Indikator Kinerja Kegiatan		Km				7,083,263.00	7,383,263.00	7,383,263.00	7,155,006.00
Output Renstra: Non Fisik		Km	1.00	1.00	1.00	7,083,263.00	7,383,263.00	7,383,263.00	7,155,006.00
ABF 001	Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	1.00	4,372,703.00	4,372,703.00	4,372,703.00	4,288,515.00
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		Km				4,372,703.00	4,372,703.00	4,372,703.00	4,288,515.00
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		Km				0.00	0.00	0.00	0.00
Indikator Kinerja Kegiatan		Km				4,372,703.00	4,372,703.00	4,372,703.00	4,288,515.00
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1.00	1.00	1.00	1,542,284.00	1,660,833.00	1,660,833.00	1,646,877.00
EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1.00	1.00	1.00	604,350.00	556,001.00	556,001.00	510,852.00
EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	1.00	1,654,037.00	1,654,037.00	1,654,037.00	1,643,854.00
EDB 951	Layanan Sarana Internal	Lain	1.00	1.00	1.00	492,032.00	492,032.00	492,032.00	487,132.00

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan

Kegiatan Harmonisasi Manual Desain Perkerasan

a. Diskusi Harmonisasi Manual Desain Perkerasan



b. Penyusunan VDF Generator Bersama Narasumber



c. FGD Harmonisasi Manual Desain Perkerasan dengan akademisi Universitas



d. FGD Harmonisasi Manual Desain Perkerasan dengan Balai-Balai Se-Indonesia

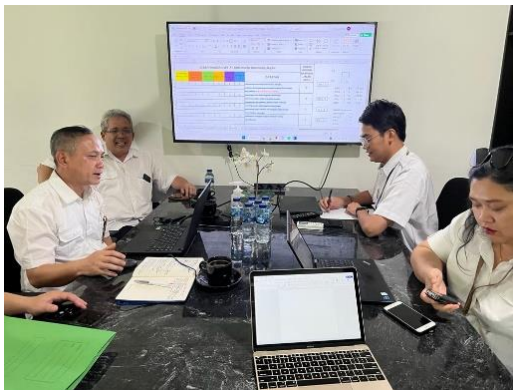


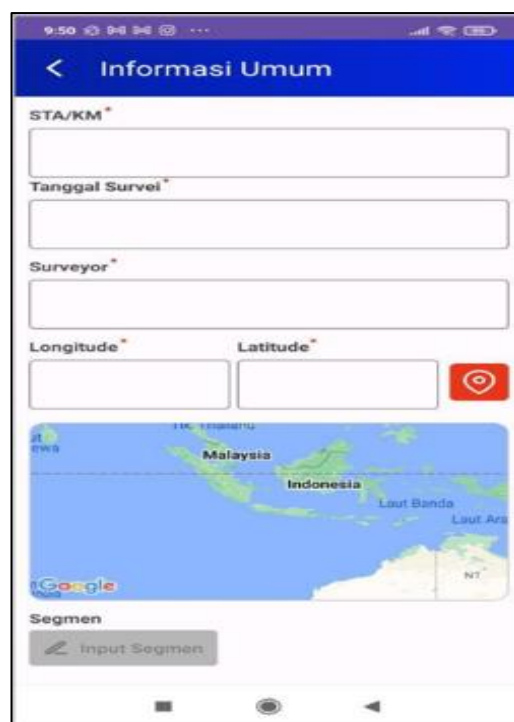
Kegiatan *Launching Aplikasi* Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) 2.0



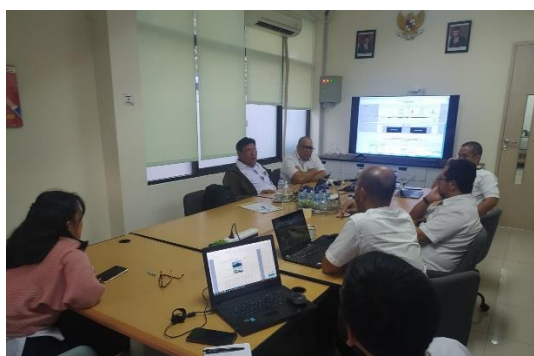
2. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan







3. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas



Diskusi dengan narasumber



Diskusi dengan stakeholder



Survei berat sumbu dan pengukuran dimensi kendaraan di rest area



Survei Primer (updating MDP)

4. Dokumentasi Kegiatan Layanan Teknis





